

**PENERAPAN PRINSIP
MUDHARABAH DI PT. BANK MUAMALAT
CABANG PEKANBARU**

TESIS

**Diajukan Untuk Melengkapi persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Ekonomi Islam**



**DISUSUN OLEH :
MHD.ERWIN SOADUAN
NIM: 0906 S2 926**



**JURUSAN EKONOMI ISLAM (EI)
PROGRAM PASCASARJANA
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2009 – 2010**

ABSTRAK

Pembiayaan Mudharabah didasarkan kepada kepercayaan (*trust investment*), dengan pengertian lain bahwa pemodal akan menyerahkan dananya kepada pihak pengelola dana setelah pemodal merasa yakin bahwa peminjam modal tersebut baik secara skill maupun moral dapat dipercaya untuk mengelola modal yang diberikan dengan keahliannya dan tidak akan memanipulasi modal tersebut. Namun bukan berarti dalam pelaksanaan perjanjian mudharabah tersebut pihak pengelola dana dilepaskan dari sistem jaminan atau ada pihak yang ketiga yang menjamin, hal ini dilakukan supaya terciptanya keadilan di antara nasabah/mudharib dan pihak bank sehingga dapat melindungi diri dari kerugian (*the end of justice is to secure from injury*).

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Penerapan prinsip mudharabah di PT.Bank Muamalat Cabang Pekanbaru, Bagaimanakah pihak Bank menyelesaikan pembiayaan mudharabah yang bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru serta Sanksi apakah yang diberlakukan kepada mudharib bila melanggar perjanjian dalam akad pembiayaan Mudharabah ?

Untuk menjawab permasalahan di atas penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan cara menganalisis data primer dan sekunder dan tersier yang didapatkan penulis sebagai pelaku lapangan sehingga menghasilkan jawaban dari setiap permasalahan yang di kemukakan. Berdasarkan penelitian dapat di simpulkan antara lain pengaturan perjanjian pembiayaan mudharabah berdasarkan kitab suci Al-Qur'an, Al-Hadist, Dewan Fatwa Syari'ah Nasional MUI, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru adalah pembiayaan mudharabah Mutlaqah di tujukan kepada perorangan atau badan usaha yang tujuan usahanya adalah untuk usaha konsumsi , pertanian, pertambangan, industri, listrik, Gas dan Air, konstruksi atau proyek, perdagangan, transportasi dan komunikasi, jasa dunia usaha, usaha jasa sosial, namun tetap tidak mengesampingkan pembiayaan terhadap usaha-usaha yang lain sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Dari hasil penelitian ini penulis menyarankan kiranya Bank Muamalat Cabang Pekanbaru untuk lebih aktif melakukan sosialisasi keberadaannya kepada masyarakat, terutama terhadap keunggulan konsep perbankan syariah. Karena Selama ini Masyarakat hanya tahu Bank Muamalat adalah Bank Haji dalam pengertian untuk mengurus Haji baik Tabungan Haji maupun Talangan Bank untuk Nasabah menunaikan ibadah Haji agar lebih berkah harus ke Bank Muamalat. Namun masyarakat kurang mengetahui bahwa Bank Muamalat juga berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dengan konsep Mudharabahnyanya. Bank tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, guna menghindarkan risiko kerugian bagi pihak Bank Muamalat yang secara langsung juga akan berdampak kepada bagi hasil nasabah yang menyimpan dananya di Bank Muamalat . Menyempurnakan akad pembiayaan mudharabah, dengan menambah klausula yang mengatur dengan tegas tentang sanksi yang akan diberlakukan terhadap nasabah/ mudharib bila melanggar akad pembiayaan mudharabah diharapkan membuat efek jera kepada nasabah penunggak.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
LEMBAR PERNYATAAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Kerangka Teori.....	17
E. Kerangka Operasional.....	21
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK MUAMALAT CABANG PEKANBARU.....	25
A. Perjanjian Dalam Hukum Islam.....	25
B. Unsur-Unsur Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Islam.....	29
C. Jenis- Jenis Perjanjian Dalam Hukum Islam.....	33
D. Pengaturan Perjanjian Mudharabah.....	38

E. Pengertian Pembiayaan Mudharabah	41
F. Jenis-Jenis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah	47
G. Kriteria Penerima Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah	48
a. Tahap Permohonan Pembiayaan	49
b. Tahap Penelitian Berkas Investigasi Pembiayaan	50
c. Analisis Pembiayaan	51
H. Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah	59
I. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Muamalat Cabang Pekanbaru.....	64
J. Mekanisme Sistem Bagi Hasil (Mudharabah) antara Nasabah/Mudharib dan Bank Muamalat Cabang Pekanbaru..	78
BAB III PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH YANG BERMASALAH DI BANK MUAMALAT CABANG PEKANBARU.....	83
A. Permasalahan Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Cabang Pekanbaru.....	83
B. Penanganan Pembiayaan Mudharabah Yang Bermasalah.....	84
C. Penyelesaian Sengketa di Bank Muamalat Cabang Pekanbaru	90
BAB IV PENERAPAN SANKSI TERHADAP NASABAH/ MUDHARIB BILA MELANGGAR AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH.....	127
A. Landasan Penerapan Sanksi Terhadap Nasabah Bila	

Melanggar Akad Pembiayaan Mudharabah.....	127
B. Penerapan Sanksi Terhadap Nasabah/ Mudharib Bila	
Melanggar Akad Pembiayaan Mudharabah di Bank	
Muamalat Cabang Pekanbaru.....	128
BAB V PENUTUP.....	131
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN	

keselamatan. Untuk Dalam memaknai Ayat tersebut diatas, umat islam perlu melaksanakan ajaran islam secara totalitas (menyeluruh) dalam segenap aspek hidup dan kehidupannya dari dunia hingga akhirat nantinya.

Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan bahwa: "Sangat disayangkan, dewasa ini masih banyak kalangan yang melihat bahwa Islam tidak berurusan dengan bank dan pasar uang, karena yang pertama adalah dunia putih sementara yang kedua adalah dunia hitam, penuh tipu daya dan kelecikan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila beberapa cendekiawan dan ekonomi melihat Islam, dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya, sebagai faktor penghambat pembangunan (*an obstacle to economic growth*). Penganut paham liberalisme dan pragmatisme sempit ini menilai bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari nilai-nilai normatif dan rambu-rambu Ilahi".¹

Bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mengatur dan mengembangkan pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana (*funding*) dari masyarakat. Hal ini terutama karena fungsi bank sebagai perantara (*intermediary*) pihak-pihak kelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*).

Sebagai *agent of development*, bank merupakan alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui berbagai jenis pembiayaan untuk pembangunan, yaitu sebagai

¹ Muhammad Safi'i Antonio, *Mukadimah Buku Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: diterbitkan kerjasama Bank Indonesia dengan Tazkia Institute, 1999), hlm. xxvi

financial intermediary (perantara keuangan) yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.²

Keberadaan (existency) lembaga perbankan selain berpengaruh terhadap dunia usaha, dimana hampir semua dunia usaha mengandalkan jasa *financial* perbankan, juga telah banyak menyerap jutaan orang tenaga kerja. Fungsi utama bank merupakan fungsi yang sangat penting bagi masyarakat dan dunia usaha adalah sebagai tempat penyimpanan dana, dan memberikan kredit/pembiayaan kepada masyarakat. Di Indonesia fungsi bank diartikan sebagai *agent of development* ³.

1. Meningkatkan mobilitas tabungan masyarakat melalui lalu lintas keuangan. yaitu sebagai lembaga yang mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.
2. Memberikan kredit dalam jumlah yang cukup besar, bank sektor-sektor yang mendapat prioritas, maupun sektor-sektor non prioritas untuk meningkatkan kesempatan kerja.
3. Menunjang usaha pemeliharaan dan peningkatan stabilitas ekonomi
4. Menunjang usaha untuk meningkatkan kedudukan golongan ekonomi lemah melalui pemberian kredit KIK (Kredit Investasi Kecil), sesuai yang tercantum dalam konsideran Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagai penjabaran Pasal 4 Undang-Undang Perbankan tahun 1992, bahwa perbankan di Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat .

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.3

³ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 86

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997 hingga 2000 menjadi suatu sarana yang sangat strategis dan menggembirakan bagi para pengusaha muslim dalam meneruskan produksi usahanya. Hal ini disebabkan kemampuan dari lembaga perbankan syariah yang berorientasi kepada sistem bagi hasil dapat memberikan keuntungan ke setiap pengelola uang, tidak hanya kepada bank sebagai kreditor yang telah memberikan pinjaman tetapi juga kepada nasabah/mudharib sebagai peminjam modal dalam mengembangkan usaha/bisnis mereka. Dari sudut pandang kepentingan ekonomi, pembiayaan perbankan syariah yang menggunakan sistem mudharabah (profit sharing) dalam memperlancar roda perekonomian umat dianggap mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan ke bank, ⁴

Dari kenyataan ini pelaksanaan sistem ekonomi Islam dan praktek perbankan non bunga menjadi alternatif yang baik, di samping merupakan suatu keharusan dan kewajiban dalam menjalankan anjuran agama, apalagi dengan disahkannya Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang juga dapat merubah haluan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran syariah (Alqur'an dan Hadist).

Undang-undang tersebut telah mengatur semua kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁵

⁴ Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2002), hlm. 123

⁵ Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 12

Sedangkan Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna', transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan /atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan /atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁶

Pembiayaan mudharabah secara tidak langsung adalah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan. Karena itu pelarangan bunga ditinjau dari ajaran Islam merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-qur'an, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu dalam hal ini nasabah/mudharib tetapi merupakan tindakan yang memperlak dan memakan harta orang lain tanpa melalui jerih payah dan berisiko serta kemudahan yang diperoleh orang kaya di atas kesedihan orang miskin.⁷

Dengan demikian perbankan syariah yang memberikan pembiayaan mudharabah terhadap nasabah/mudharib dengan sendirinya akan menjadikan hubungan di antara kedua belah pihak bagaikan mitra dalam meraih keuntungan riil pada pengelolaan kegiatan usaha mereka. Pada konsep pembiayaan bagi hasil mudharabah dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah Qiradh adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pemilik dana

⁶ Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 25

⁷ Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1997), hlm. 184

Hubungan keterikatan antara dua pihak tersebut akan melahirkan konsekuensi yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yaitu seluruh kewajiban yang harus ditunaikan dan apa-apa yang menjadi hak masing-masing yang akan diterima. Dalam Alqur'an terdapat pedoman dalam bermu'amalah:

⁸ Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), hlm. 40

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa perjanjian pembiayaan mudharabah merupakan perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola usaha tanpa memakai agunan, yang mana di dalam akad tersebut dinyatakan akan membagi keuntungan di antara mereka. Maka dapat dipahami bahwa perjanjian mudharabah didasarkan kepada kepercayaan (trust investment), dengan pengertian lain bahwa pemodal akan menyerahkan dananya kepada pihak pengelola dana setelah pemodal merasa yakin bahwa peminjam modal tersebut baik secara skill maupun moral dapat dipercaya untuk mengelola modal yang diberikan dengan keahliannyadan tidak akan memanipulasi modal tersebut. Namun bukan berarti dalam pelaksanaan perjanjian mudharabah tersebut pihak pengelola dilepaskan dari sistem jaminan atau ada pihak yang ketiga yang menjamin, hal ini

dilakukan supaya terciptanya keadilan di antara nasabah/mudharib dan pihak bank sehingga dapat melindungi diri dari kerugian (the end of justice is to secure from injury).⁹

Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat

Pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Cabang Pekanbaru tidak terlepas dari mekanisme pelaksanaan perjanjian yang telah ditetapkan berdasarkan syarat dan rukun dalam akad, sesuai dengan yang dikemukakan oleh ulama fiqhiyah dan juga Dewan Syariah Nasional MUI tentang mudharabah (qiradh). Oleh karena itu keabsahan suatu perjanjian pembiayaan mudharabah tidak terlepas dari pada pemenuhan syarat dan rukun mudharabah itu sendiri. Adapun rukun dan syarat pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Pengelola dana (mudharib) yang cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka pada waktu menandatangani akad (kontrak).
- c. Modal, yaitu sejumlah uang dan/ atau asset yang diberikan oleh penyedia modal kepada mudharib.
- d. Keuntungan, artinya sejumlah kelebihan yang dapat sebagai kelebihan dari modal.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (Mudharib) sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana.¹⁰

Adanya klausula yang menentukan sahnyanya suatu perjanjian di dalam Keputusan Dewan Syariah yang berlandaskan hukum Islam dan telah dipakai bank syariah sebagai rujukan dalam pembiayaan mudharabah merupakan sebuah gambaran bahwa di dalam

⁹ Bismar Nasution, Mengkaji Ulang Sebagai landasan Pembangunan Ekonomi, Pidato pada Pengukuhan Guru Besar, USU- Medan 17 April 2004, hlm. 5

¹⁰ Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, hlm. 48

perbankan syariah seorang mudharib harus memenuhi segala klausula yang tertuang dalam isi kontrak, suatu perjanjian berupa kewajiban yang harus ditunaikan setelah pengelolaan usaha. Dengan demikian pelaksanaan suatu perjanjian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah) antara mudharib dan shahibul maal tersebut seyogianya memberikan gambaran keuntungan kepada kedua belah pihak.

Sebelum disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dalam menjalankan perannya, Bank Syariah berlandaskan pada UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang kemudian dijabarkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993, yang pada pokoknya menetapkan hal-hal antara lain:

- 1) Bahwa Bank berdasarkan bagi hasil adalah Bank umum dan Bank perkreditan rakyat yang melakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.
- 2) Prinsip bagi hasil yang dimaksud adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariah.
- 3) Bank berdasarkan bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.
- 4) Bank umum atau Bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Sebaliknya Bank umum atau Bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan kepada prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.¹¹

Pada tahun 1998 muncul UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa perubahan yang

¹¹ Ibid, hlm. 32

memberikan peluang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah. Bank Syariah lahir sebagai salah satu alternatif terhadap persoalan bunga Bank, karena Bank Syariah merupakan lembaga keuangan perbankan yang beroperasi dan produknya dengan prinsip dasar tanpa menggunakan sistem bunga dengan menawarkan sistem lain yang sesuai dengan syariah Islam. Prinsip inilah yang membedakan secara prinsipil antara sistem operasional Bank Syariah dengan Bank konvensional. Bagi Bank konvensional bunga merupakan hal penting untuk menarik para investor menginvestasikan modalnya pada suatu Bank. Semakin tinggi tingkat bunganya semakin tertarik para investor menabung. Tingkat suku bunga merupakan unsur esensial dalam sistem perbankan konvensional. Bank Syariah yang bekerja menggunakan sistem non bunga melalui transaksi dengan menggunakan sistem profit and loss sharing yaitu bagi hasil keuntungan dan kerugian yang terjadi ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu mudharib dan shahihul maal. Dalam sistem bunga Bank dan bagi hasil mempunyai sisi persamaan yaitu sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik modal, namun keduanya memiliki perbedaan yang prinsipil, yaitu sistem bunga uang merupakan sistem yang dilarang agama Islam, sedangkan bagi hasil merupakan keuntungan yang tidak mengandung riba sehingga tidak diharamkan oleh ajaran Islam.¹²

Penentuan bunga dibuat waktu akad berlangsung dengan asumsi harus selalu untung, tidak ada asumsi kerugian. Pembayaran bunga tetap dilakukan misalnya dalam suatu proyek, tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan itu mempunyai keuntungan atau tidak. Sedangkan sistem bagi hasil penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil di buat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Maka dalam suatu proyek yang dilakukan nasabah, sistem bagi hasil mempunyai keuntungan sebab tidak akan

¹² Muslimin H. Kara, Bank Syariah di Indonesia Analisa Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah, (Yogyakarta: UII Press, Cetakan Pertama, 2005), hlm. 72

menimbulkan negatif spread, pertumbuhan modal negatif, dalam permodalan Bank sebagaimana yang biasa terjadi dalam perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga. Hal itu terjadi, di satu pihak disebabkan karena adanya tingkat suku bunga deposito yang tinggi, dan di lain pihak bunga kredit dibebani tingkat bunga yang rendah untuk menarik para investor menanamkan modalnya apabila mengalami kerugian akan ditanggung bersama.¹³

Sisi lain pada sistem bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan sedangkan konvensional jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat. Bank Islam dengan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti dari penerapan sistem bunga ternyata dinilai telah berhasil menghindarkan dampak negatif dari penerapan bunga, seperti :

- a) pembebanan pada nasabah berlebih-lebihan dengan beban bunga berbunga (compound interest) bagi nasabah yang tidak mampu membayar pada saat jatuh temponya .
- b) timbulnya pemerasan (eksploitasi) yang kuat terhadap yang lemah.
- c) terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan kelompok elit, para bankir dan pemilik modal.
- d) kurangnya peluang bagi kekuatan ekonomi lemah untuk mengembangkan potensi usaha.¹⁴

Selain mampu menghindarkan dari dampak negatif penerapan bunga, bank dengan sistem bagi hasil dinilai mengalokasikan sumber daya dana secara efisien. Kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya dan sumber dana secara efisien merupakan modal utama untuk

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek, (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), hlm. 61

¹⁴ Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMI TAKAFUL), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 51

menghadapi persaingan pasar dan perolehan laba. Di dalam Peraturan Pemerintah dijelaskan lebih lanjut bahwa “yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil dalam peraturan ini adalah prinsip muamalat berdasarkan syariat dalam melakukan kegiatan usaha Bank”.¹⁵

Hadirnya Bank Syariah dewasa ini menunjukkan kecendrungan semakin membaik. Produk-produk yang dikeluarkan Bank Syariah cukup variatif sehingga mampu memberikan pilihan atau alternatif bagi calon nasabah untuk memanfaatkannya. Dari survei yang pernah dilakukan, kebanyakan Bank Syariah masih mengedepankan produk dengan akad jual beli, diantaranya adalah Murabahah dan Al-Bai' Bitsaman Ajil. Padahal sebenarnya Bank Syariah memiliki produk unggulan yang merupakan produk khas dari Bank Syariah yaitu al-Musyarakah dan al-Mudharabah.¹⁶

Dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 mudharabah diartikan sebagai penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.¹⁷

Pembiayaan Mudharabah merupakan salah satu produk unggulan yang merupakan produk khas dari Bank Syariah, namun produk unggulan tersebut belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Penyebab hal tersebut ditempuh oleh para pengelola Bank Syariah karena berkaitan dengan risiko Bank yang ditimbulkan apabila menerapkan produk

¹⁵ Wijarno, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), hlm. 33

¹⁶ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 39

¹⁷ *Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Pasal 1 ayat (5)*

Mudharabah adalah cukup tinggi, namun saat ini bank yang operasionalnya menggunakan prinsip Syariah sudah memikirkan cara-cara yang tepat dalam melakukan pembiayaan khususnya pembiayaan yang berkaitan dengan konsep Mudharabah. Salah satu aspek bagi hasil adalah aspek yang berkaitan dengan bagi risiko. Dalam kerangka kerja kelembagaan saat ini, pemilik modal dapat mendistribusikan risiko melalui pembagian manajemen dan utang dalam bentuk bergabung dalam pemilikan saham. Sementara pemilik tenaga tidak dapat membagikan tenaganya kepada pemilik modal. Jika usaha mengalami risiko, maka dalam konsep bagi hasil (mudharabah) kedua belah pihak akan bersama-sama menanggung risiko. Dimana pihak pemilik modal menanggung kerugian modalnya, di pihak lain pelaksana proyek mengalami kerugian tenaga yang telah dikeluarkan. Dengan kata lain, masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dalam sistem berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan. Hal demikian menunjukkan keadilan dalam distribusi pendapatan.¹⁸

Menetapkan fatwa tentang PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)

Pertama : Pembiayaan Mudharabah

1. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).

¹⁸ Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.14

4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lali, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan

Kedua : rukun dan syarat pembiayaan

1. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum
2. Pernyataan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut :

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi
 - a. Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh diisyaratkan untuk satu pihak
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Beberapa ketentuan hukum pembiayaan

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka terdapat berapa masalah yang menjadi tema pembahasan tesis ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pada prinsip mudharabah pada PT.Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru ?

2. Bagaimanakah pihak Bank menyelesaikan pembiayaan mudharabah yang bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru?
3. Sanksi apakah yang diberlakukan kepada mudharib bila melanggar perjanjian dalam akad pembiayaan Mudharabah ?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dilakukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Pekanbaru
2. Untuk menganalisis upaya pihak Bank dalam menyelesaikan pembiayaan mudharabah yang bermasalah pada Bank Muamalat Cabang Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapat landasan yang kokoh setelah adanya paket deregulasi yaitu, berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang Undang No.7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya sistem bagi hasil dalam bank syariah. Dengan demikian pembiayaan mudharabah dengan prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah merupakan cerminan dari kegiatan muamalah yang berlandaskan syariah Islam ketika melakukan kegiatan usaha. Perbankan syariah dalam menerapkan prinsip bagi hasil dapat dilakukan dengan beberapa akad, yaitu akad pembiayaan al-musyarakah, al-murabahah dan

al-mudharabah untuk kegiatan pembiayaan modal usaha, ataupun penyaluran biaya kepada mereka yang kekurangan dana tetapi memiliki keterampilan untuk menjalankan bisnis dengan suatu keuntungan tidak pasti yang mungkin dapat atau juga mungkin tidak dapat diwujudkan.¹⁹

Pertama, Al-Musyarakah atau dalam kalimat lain dikenal dengan syirkah merupakan suatu transaksi antara dua orang atau lebih yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerjasama yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.²⁰

Kedua, Al-Murabahah yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Namun dalam penelitian ini penulis tidak akan membahas tentang pembiayaan musyarakah secara mendalam, sebab pembiayaan yang berhubungan dengan seorang nasabah/mudharib hanya dalam pembiayaan mudharabah saja.²¹

Ketiga yaitu Al-mudharabah adalah sistem pendanaan operasional realitas bisnis, dimana baik sebagai pemilik modal biasanya disebut shahibul maal dengan menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola disebut sebagai mudharib untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang disebutkan dalam akad mereka.²²

¹⁹ Abdullah Saed, Menyual Bank Syari'ah, Kritikan atas Interpretasi Bunga Bank NeoRevivaless (Jakarta, Paramadina, 2004), hlm. 110

²⁰ Hasballah Thaib, Hukum Akad (kontrak) Dalam Fiqh Islam dan Praktek Di Bank SistemSyari'ah, (Medan: tp, 2005), hlm. 98

²¹ Adiwarman A.Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 113

²² Ascaya Diana Yunita, Bank Syari'ah: Gambaran Umum (Jakarta: PPSK BI, 2005), hlm. 21

Jika mengalami kerugian setelah adanya pengelolaan usaha oleh mudharib bukan karena kelalaian yang disengaja maka akan ditanggung oleh investor atau shahibul maal.²³

Mudharabah berasal dari kata dharb, yang artinya memukul atau berjalan, pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.²⁴

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Al-Thabrani yang artinya sebagai berikut :Bahwa Sayyidina Abbas Ibn Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak, jika menyalahi peraturan tersebut.²⁵

Secara umum mudharabah dibagi kepada dua jenis, yaitu :

1. Mudharabah Muthlaqah, yaitu suatu bentuk kerjasama antara shahibul maal dengan mudharib tanpa membatasi spesifikasi jenis usahanya, sepanjang usaha tersebut dianggap baik dan bisa memberi keuntungan.
2. Mudharabah Muqayyadah, yaitu shahibul maal menentukan syarat atau pembatasan kepada pengelola dana dalam menjalankan usaha. Maka inti mekanisme dari pada mudharabah itu sendiri pada dasarnya terletak pada kerjasama yang baik antara pemberi modal dan

²³ Abdullah Saed, Op Cit., hlm. 77

²⁴ Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek, (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), hlm. 95

²⁵ Antonio, Muhammad Syafi'i, Op Cit, hlm. 96

pengelola dana dengan dasar kepercayaan, kerjasama inilah yang merupakan karakter utama dalam pelaksanaan perjanjian mudharabah di perbankan syariah.

Penyaluran dana terhadap seorang nasabah/mudharib atau peminjam modal baik ia dalam bentuk pembiayaan mudharabah tidak terlepas dari sah atau tidaknya suatu akad (kontrak) yang di sepakati oleh kedua belah pihak, dengan kata lain bahwa akad antara bank dan nasabah/mudharib tersebut selalu berpedoman kepada ketentuan yang telah berlaku dalam pembiayaan bagi hasil dalam bank syariah Secara bahasa perjanjian menurut jumhur ulama dikatakan dengan Akad, dan secara terminologi akad didefinisikan dengan Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerima) sesuai dengan kehendak syari'at yang mempengaruhi pada objek perikatan.²⁶

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian dapat dilihat dari pernyataan perjanjian tersebut memakai ijab dan qabul, dan harus ada pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian, di samping bahwa objek yang ada dalam perjanjian tersebut harus dibenarkan oleh syariah.

Ulama fiqh juga telah menetapkan syarat akad sebagai berikut :

- a.. Mukallaf, artinya pihak yang melakukan akad telah cakap bertindak secara hukum.
- b. Objek akad tersebut diakui oleh syara'.
- c. Akad itu tidak dilarang oleh nash.
- d. Akad harus memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan yang diakadkan.
- e. Akad tersebut bermanfaat.

²⁶ Ibid., hlm. 8-10

melaksanakan kegiatan usahanya. Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam tesis ini, maka perlu dicantumkan definisi-definisi tersebut:²⁸

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama pemberi modal sedangkan pihak kedua memanfaatkan untuk tujuan-tujuan usaha dan keuntungan dari usaha tersebut akan dibagikan di antara mereka berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam akad (kontrak).²⁹

Perjanjian pembiayaan adalah perjanjian berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³⁰

Untuk menunjang diperolehnya data yang faktual dan akurat, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis, yaitu hanya menggambarkan secara sistematis fakta-fakta terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dengan tujuan membatasi kerangka studi kepada analisis atau suatu klasifikasi tanpa secara langsung bertujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa atau teori-teori.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan sebuah penelitian hukum normatif, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan bagi hasil (Mudharabah) di Bank Muamalat Cabang Pekanbaru , dengan demikian penelitian

²⁸ Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Angka 1

²⁹ Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, Op Cit, hlm. 40

³⁰ Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 ayat 12

ini menempatkan kaidah-kaidah hukum terkait dengan bagi hasil (Mudharabah) di bank syariah, dalam arti sejauh mana hukum dalam mengatur tentang bagi hasil, mekanisme dan pelaksanaan perjanjiannya. Penelitian ini menggunakan tehnik penelitian Lapangan (Field Research).

Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen yang bersumber dari bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang- Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Bank Indonesia No. 2 Tahun 2004, Himpunan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, Fiqh Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang relevan dan wawancara dengan pihak Bank Muamalat Cabang Pekanbaru. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa hasil-hasil seminar atau penemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pandangan kalangan pakar hukum sepanjang hal itu berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini.³¹

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini dipergunakan untuk memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, kamus hukum ekonomi, majalah dan jurnal ilmiah. Pengumpulan data dimulai dengan melakukan identifikasi seluruh data yang relevan dengan permasalahan, penelitian, setelah data teridentifikasi baru dilakukan inventarisasi data-data, kemudian data yang terkumpul akan dikelompokkan atau dipilah-pilah untuk digunakan proses analisis data.

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1982), hlm. 24

G.Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam pemecahan masalah, maka penulis menyusun sistematika yang terdiri dari lima bab yang berkaitan, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan-batasan masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka dan Sistematika penulisan.

BAB II : Penerapan Prinsip Mudharabah di PT. Bank Muamalat Cabang Pekanbaru.

BAB III : Pada bab ini berkaitan dengan Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Muamalat Cabang Pekanbaru

BAB IV: Merupakan bab inti dari tesis ini, yaitu Penerapan sanksi terhadap Mudharib/Nasabah Pembiayaan Apabila melanggar Akad Pembiayaan Mudharabah.

BAB V : Penutup yang meliputi Kesimpulan, dengan memberikan kesimpulan dalam penelitian ini dan Saran-saran yang mungkin dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi yang membutuhkan, serta lampiran lainnya yang berhubungan dengan tesis ini.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK MUAMALAT CABANG PEKANBARU

A. Perjanjian Dalam Hukum Islam

Islam adalah agama yang di ridhoi Allah SWT dan bersifat *rahmatan lil alamin* yang mengandung makna sebagai agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Islam memiliki ajaran yang berisi peraturan (regulation) yang bersifat komprehensif dan universal sehingga kehidupan manusia terjaga hubungan baik antara satu individu dengan individu lainnya(hablum minannas) dan juga menjaga hubungan yang bersifat transendental spiritual dengan Tuhan-Nya(habblum minAllah)

Hubungan vertikal kepada Allah SWT bisa terwujud dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya, di sisi lain manusia senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya dalam bentuk muamalah baik di bidang harta kekayaan maupun hubungan kekeluargaan, hubungan sesama manusia khususnya di bidang harta kekayaan biasanya dapat diwujudkan dalam bentuk perjanjian atau *akad*.¹

¹ Abdul Ghofur Ansory, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm.1

Dalam Al-Qur'an ada terdapat dua (2) istilah yang menyangkut dengan perjanjian, yaitu kalimat *al-aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Al-Qur'an memakai kalimat pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kalimat yang kedua dalam Al-Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai perjanjian dan perikatan dalam hukum Islam berikut dikemukakan beberapa pendapat kalangan ulama fiqhiyah, antara lain yaitu:

Pertama, menurut Wahbah Alzuhaily secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi dari satu segi maupun dari dua segi.²

Sedangkan kalimat *al-'ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.³

Kedua, dalam pandangan ulama syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah, akad merupakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, pembebasan.

Ketiga, menurut Abdor Raof mengatakan bahwa pada dasarnya ada tiga tahap yang menimbulkan perikatan (akad) yaitu sebagai berikut :

² Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyik: dar alFikr, 1989), hlm. 80

³ Gemala dewi, dkk, *Op Cit*, hlm. 45

- a. ***Al'ahdu* (perjanjian)**, yaitu ada pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain, dalam hal ini janji tersebut mengikat orang yang mengatakannya supaya terlaksananya perjanjian yang telah dibuat tersebut.
- b. **Persetujuan** yaitu pernyataan dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama kemudian janji tersebut harus sesuai dengan janji pada pihak pertama.
- c. "***Al-aqdu***" yaitu apabila ada dua buah janji yang dilaksanakan oleh para pihak dimana masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian mengikatkan diri dengan kata lain hal tersebut bukan lagi *al' ahdu* tetapi sudah *Al-aqdu*.⁴

Dari tiga tahap yang menimbulkan perikatan (akad) di atas dapat dimisalkan ketika si A menyatakan janji untuk menjual sebidang tanah miliknya kepada si B, kemudian si B menyatakan janji untuk membeli tanah tersebut, maka dalam tahap ini si A dan si B sudah masuk ke tahap *al' ahdu*, apabila objek tanah telah jelas dan harga disepakati oleh kedua belah pihak maka terjadilah persetujuan, kemudian dari kedua janji tersebut dilaksanakan maka terjadilah perikatan atau *al-aqdu*.

⁴ Gemala Dewi, *Op Cit*, hlm. 46

Menurut Musthafa Ahmad Az-zira'i salah satu pakar fiqh di Jordania asal Syiri'a mengatakan bahwasanya tindakan seseorang tersebut dibagi kepada dua bentuk yaitu tindakan berupa perkataan yang meliputi yang bersifat akad dan non akad, tindakan yang berupa perkataan yang bersifat akad terdiri atas dua atau beberapa pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian, sedangkan perkataan yang bersifat non akad yaitu apa-apa yang mengandung kehendak pemilik untuk menetapkan atau melimpahkan hak membatalkan atau mengugurkan apa-apa yang tidak mengandung kehendak pihak yang menetapkan atau mengugurkan suatu pihak tetapi perkataannya itu memunculkan suatu tindakan hukum⁵.

Keempat, di dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad perhimpunan atau penyaluran dan bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) dikemukakan bahwa akad adalah perjanjian yang tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.⁶

Kelima, di dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.⁷

⁵ Hasballah thaib, *Op Cit*, hlm. 2

⁶ Abdul Ghofur Ansory, *Op Cit*, hlm. 21

⁷ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Pasal 1 ayat 13

Dari definisi Akad sebagaimana tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa perjanjian atau akad adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri satu sama lainnya, dengan diwujudkan dalam ijab dan qabul yang objeknya sesuai dengan syariah, dengan pengertian lain bahwa perjanjian tersebut berlandaskan keridhoan atau kerelaan secara timbal balik dari kedua belah pihak terhadap objek yang diperjanjikan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian akad atau perjanjian akan menimbulkan kewajiban prestasi pada satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut.

B. Unsur-Unsur Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Islam

Merujuk kepada definisi perjanjian atau akad sebagaimana dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi rukun dan syarat dari suatu perjanjian atau akad tersebut. Dalam pandangan ulama fiqhiyah rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan, sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk semua hal, peristiwa dan tindakan yang dimaksud. Maka rukun dalam perjanjian atau akad adalah ijab dan qabul sedangkan syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subjek atau objek dari suatu perjanjian dimaksud,⁸ dalam hal ini harus sesuai dengan syariah. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian atau akad adalah sebagai berikut :

1. Pernyataan Untuk Mengikatkan Diri.

⁸ *Ibid*, hlm. 22

Ijab adalah suatu pernyataan kehendak oleh satu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya (*qabil*). Dengan demikian ijab dan qabul harus ada dalam melaksanakan suatu perjanjian atau akad yaitu berupa pernyataan dari pihak-pihak untuk mengikatkan diri terhadap perjanjian yang dibuat tersebut.

Pernyataan untuk mengikatkan diri (*sighot al-aqdu*) menjadi sesuatu yang urgen dalam rukun akad. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tujuan, jenis akad dan sasaran yang dikehendaki oleh para pihak. Bagi ulama Hanafiyah rukun akad sebenarnya hanya satu yaitu *sighot al-aqdu* (ijab dan qabul) sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad dimasukkan kepada syarat-syarat akad, karena dalam pandangan ulama Hanafiyah yang dikatakan rukun adalah sesuatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad berada di luar esensi akad⁹.

Pernyataan ijab dan qabul bisa berbentuk perkataan, tulisan, perbuatan dan isyarat, maka akad dalam bentuk perkataan adalah berupa *shigat* atau ucapan. Hal ini yang paling banyak digunakan sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja kedua belah pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhaannya¹⁰.

Akad melalui tulisan dibolehkan baik bagi orang yang mampu berbicara atau tidak dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaedah yang dibuat oleh ulama sebagai berikut :

⁹ Hasballah Thaib, *Op Cit*, hlm. 4

¹⁰ Rahmat Syafi'i, *Op Cit*, hlm. 46

Persyaratan akad melalui perbuatan bisa dilakukan asal perbuatan tersebut menunjukkan saling meridhoi. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Hanabilah menambahkan bolehnya perbuatan menjadi ijab dan qabul tersebut kepada perbuatan terhadap barang-barang yang sudah diketahui secara umum oleh manusia.¹¹

Kemudian akad bisa dilakukan melalui isyarat yang menunjukkan secara jelas kehendak para pihak-pihak yang maksudkan oleh akad, misalnya isyarat yang ditujukan oleh orang yang bisu yang tidak bisa tulis dan baca. Untuk hal ini ulama fiqh membuat suatu kaedah bahwa isyarat yang jelas dari orang yang bisu sama dengan penjelasan dengan lisan¹².

Mengenai syarat-syarat ijab dan qabul para ulama fiqh menetapkan sebagai berikut:

- a. Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dapat dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad atau perjanjian.
- b. Antara ijab dan qabul harus sesuai.
- c. Antara ijab dan qabul harus bersambung, berada di tempat yang sama, jika kedua belah pihak hadir atau berada di tempat atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya¹³.

2. Pihak-Pihak Yang Berjanji (Berakad)

Pihak yang berjanji atau berakad diharuskan sama-sama mempunyai kecakapan hukum dalam tindakan hukum. Dalam istilah fiqhnya harus *Mukallaf* dengan arti lain orang yang hendak

¹¹ Rahmat Syafi'i, *Op Cit*, hlm. 49

¹² Hasballah Thaib, *Op Cit*, hlm. 7

¹³ Rahmat Syafi'i, *Op Cit*, hlm. 51

melakukan perjanjian tersebut sudah dewasa menurut ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian diharuskan juga yang berakad itu sehat akal nya artinya tidak sedang mengalami gangguan jiwa atau gila, maka pada tahap ini kapasitas seseorang telah sempurna, sebab telah mampu untuk bersikap dan bertindak demi keamanan dalam mengelola dan mengontrol usaha bisnisnya dengan bijaksana¹⁴.

Sehubungan dengan tindakan atau berbuat, kebijakan manusia pada dasarnya dibagi kepada tiga bentuk untuk berbuat kecakapan atau melakukan perjanjian, yaitu:

- a. Manusia yang tidak bisa atau tidak dapat melakukan perjanjian atau akad apapun, seperti orang yang cacat mental/jiwa, anak kecil yang belum *mumayyiz*.
- b. Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, misalnya anak yang sudah *mumayyiz* tetapi belum baligh atau dewasa.
- c. Manusia yang dapat melakukan seluruh perjanjian atau akad yaitu orang yang telah memenuhi syarat menjadi *mukallaf*.¹⁵

Akad atau perjanjian yang dilaksanakan oleh orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* secara langsung hukumnya tidak sah, tetapi jika dilakukan oleh orang tua mereka dari sifat akad yang bisa dilakukan oleh wali mereka yang kemudian memberi manfaat bagi orang-orang yang diampunya dalam hal ini akad tersebut hukumnya sah.¹⁶

3. Objek Perjanjian (Akad).

¹⁴ Gemala Dewi, dkk, *Op Cit*, hlm. 53

¹⁵ *Ibid*, hlm. 54

¹⁶ Hasballah Thaib, *Op Cit*, hlm. 8

Objek akad atau perjanjian adalah sesuatu atau benda-benda yang dijadikan akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang di timbulkan. Bentuk objek akad tersebut dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud seumpama manfaatnya.¹⁷

Untuk Objek akad harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Objek akad tersebut harus diakui oleh syara', dengan ketentuan objeknya harus :

- 1). Berbentuk harta
- 2). Dimiliki oleh seseorang
- 3). Bernilai harta menurut harta dalam Islam.¹⁸

b. Objek akad tersebut harus ada dan bisa diserahkan ketika berlangsungnya akad.

Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesalah pahaman di antara para pihak yang dapat menjadi perselisihan dikemudian hari. Jika objek dalam perjanjian tersebut berupa benda maka bentuk, fungsi, dan keadaan, faedahnya ada cacat pada benda objek akad dimaksud. Maka perjanjian tersebut harus dibatalkan, sebab perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak senantiasa memiliki tujuan yang jelas dan transparan tanpa adanya unsur tipu daya dan harus transparan.

C. Jenis- Jenis Perjanjian Dalam Hukum Islam

¹⁷ Gemala Dewi , dkk, *Op Cit*, hlm. 60

¹⁸ Hasballah Thaib, *Op Cit*, hlm. 8

Perjanjian atau akad dalam hukum Islam dibagi beberapa macam, dimana tiap macamnya akad tergantung dari sudut pandang mana dilihat, apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', akad atau perjanjian dibagi kepada dua macam yaitu:

1. Perjanjian atau akad yang *sahih*.

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara'. oleh karena itu konsekuensi yang ditimbulkan akan mengikat para pihak yang berjanji atau yang berakad.¹⁹

Menurut ulama Hanafiyah akad atau perjanjian yang sah dibagi kepada dua macam, yakni sebagai berikut:

Pertama, akad yang *nafiz*, yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya atau dengan kata lain akan yang sempurna untuk dilaksanakan.²⁰

Kedua, akad yang *mauquf*, yaitu akad dilakukan oleh seseorang yang cakap bertindak secara hukum tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan dan melaksanakan perjanjian/akad tersebut, hal ini dapat dicontohkan ketika si A memberikan uang kepada si B sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk membeli seekor sapi, dan ternyata uang yang tiga puluh juta tadi dapat membeli 3 ekor sapi sehingga si B membeli 3 ekor sapi dengan uang tersebut.

¹⁹ Rahmat Syafi'i., *Op Cit*, hlm. 66

²⁰ Hasballah Thaib, *Op cit*, hlm. 16

Keabsahan dari akad jual beli dengan 3 ekor sapi ini sangat tergantung kepada persetujuan si A. Sebab yang disuruh pertama kali si B hanya untuk membeli 1 ekor sapi. Dari permasalahan jual beli ini dapat dianalisa, jika si A menyetujui akad yang dilakukan oleh si B maka jual beli itu sah, tetapi jika tidak maka jual beli tersebut menjadi batal.

2. Akad yang tidak *sahih*

Akad yang tidak sah atau tidak sah adalah akad/ perjanjian yang tidak memenuhi unsur rukun dan unsur syarat, artinya akad ini tidak mempunyai dampak hukum atau tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah akad yang seperti ini tergolong kepada akad yang *batal* dan *fasid* yang bisa dibedakan, yaitu kalau akad yang batal berarti akad ini tidak memenuhi rukun akad, atau tidak ada barang yang diakadkan seumpama akad yang dilakukan oleh seorang yang bukan ahli akad contoh akad orang yang gila, sedangkan akad yang *fasid* adalah akad yang memenuhi persyaratan dan rukunnya tetapi dilarang oleh syara' seperti halnya menjual barang yang tidak diketahui sehingga dapat menimbulkan persoalan dibelakang hari.²¹

Selanjutnya akad atau perjanjian dilihat dari sisi mengikat atau tidak mengikat. Yakni jika akad itu dilihat dari segi mengikat maka sudah mempunyai konsekuensi tidak boleh membatalkan akad hanya satu pihak, atau tanpa seizin pihak lain di dalam melangsungkan akad ini. Ulama Fiqh membaginya kepada tiga macam, yaitu :

²¹ Rahmat Syafi'i, *Op Cit*, hlm. 67

- a. Akad yang mengikat dan tidak bisa dibatalkan sama sekali, seperti akad perkawinan, dalam hal ini akad yang tidak boleh dibatalkan kecuali dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh syara' untuk membatalkannya, seumpama melalui thalak dan khulu'.
- b. Akad yang mengikat tetapi bisa dibatalkan atas kehendak kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa atau *al-muzara'ah* (kerjasama dalam bidang pertanian), maka dalam hal ini para pihak dibenarkan untuk melakukan *khiyar* artinya ada hak para pihak untuk memilih apakah meneruskan akad yang telah memenuhi rukun tersebut atau membatalkannya.
- c. Akad yang hanya mengikat salah satu pihak seperti *al rahn* dan *al kafalah*.²²

Apabila akad atau perjanjian tersebut dilihat dari segi bentuk *tasharuf* atau aktivitas hukum, maka ia memiliki dua keadaan umum yaitu:

1). Akad tanpa syarat yakni suatu akad yang diucapkan oleh seseorang tanpa memberi batasan dengan suatu benda atau tanpa menetapkan suatu syarat akad, yang seperti ini dihargai oleh syara' sehingga menimbulkan dampak hukum.

2). Akad bersyarat yaitu akad yang diucapkan oleh seseorang dan dikaitkan dengan sesuatu, dengan kata lain apabila syarat atau yang dikaitkan itu tidak ada maka akadnya pun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut atau ditangguhkan pelaksanaannya. Contoh "saya akan menjual tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal ini dengan harga Rp.

²² Hasaballah Thaib, *Op Cit*, hlm. 17-18

700.000.000,- jika disetujui oleh isteri saya”. Maka ketika telah ada persetujuan isterinya maka akad tersebut dianggap sah. Untuk persoalan akad bersyarat ini ulama fiqhiyah membaginya lagi kepada tiga macam, yaitu :

Pertama, *Ta’liq syarat* yaitu menautkan atau mengkaitkan hasil sesuatu urusan dengan urusan yang lain, artinya terjadinya akad tersebut tergantung kepada urusan lain, maka jika urusan yang dikaitkan pertama tidak jadi maka akadpun tidak ada, contoh; jika orang yang berutang kepadamu pergi jauh, saya menjamin utangnya.

Kedua, *Taqyid syarat*, yaitu syarat pada suatu akad atau aktifitas berakibat hukum yang hanya berupa ucapan saja, sebab pada hakekatnya tidak ada atau tidak mesti dilakukan, seperti orang yang menjual televisi dengan syarat ongkos pengangkutannya ditanggung oleh yang punya toko.

Ketiga, *Syarat Ifadah*, yaitu menyandarkan akad tersebut kepada sesuatu masa yang akan datang,²³

Hal ini dicontohkan perkataan seorang atasan “gaji mereka akan dinaikkan pada awal tahun depan”. Pada konsep hukum Islam suatu perjanjian atau akad akan dinilai berakhir ketika perjanjian yang dibuat oleh para pihak telah berakhir.

Ulama fiqhiyah memandang bahwa perjanjian atau akad akan berakhir yaitu sebagai berikut:

²³ Hasballah Thaib, *Op Cit*, hlm. 19

- a) Telah berakhirnya masa akad, jika dalam perjanjian/akad tersebut memiliki tenggang waktu. Menurut kebiasaannya dalam suatu perjanjian telah disebutkan atau ditentukan saat, kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan berjalannya waktu yang dilalui maka secara otomatis pula perjanjian atau akad yang dilakukan tersebut berakhir, kecuali dikemudian hari telah ditentukan oleh para pihak untuk melanjutkannya kembali.
- b). Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut tidak mengikat.
- c). Dalam akad yang bersifat mengikat, yaitu suatu akad bisa dianggap berakhir jika:
- (1). Akad Jual beli itu fasid, hal ini bisa disebabkan ada unsur kecurangan atau salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.
 - (2). Berlakunya syarat *khiyar aib*, yaitu adanya hak untuk membatalkan perjanjian karena sesudah perjanjian tersebut terdapat pada objek akad sesuatu yang cacat, atau *khiyar rukyah*, yaitu adanya hak untuk memilih bagi pembeli untuk berlangsungnya atau membatalkannya jual beli terhadap objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.²⁴
 - (3). Akad tersebut tidak dilaksanakan oleh satu satu pihak
 - (4). Telah tercapainya tujuan akad tersebut secara sempurna.
- d). Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

D. Pengaturan Perjanjian Mudharabah

²⁴ *Ibid*, hlm. 34

Dalam Hukum Islam Al-Qur'an dan Al-Hadist merupakan dasar hukum dari setiap perbuatan manusia dimuka bumi ini, termasuk di dalamnya mengatur tentang kegiatan muamalah dan perjanjian mudharabah atau bagi hasil mudharabah dalam istilah lain dengan *akad trust financing, trust investment*. Untuk perjanjian bagi hasil mudharabah telah dikenal oleh ummat Islam sejak jaman Nabi Muhammad S.A.W. sewaktu Rasulullah berprofesi sebagai pedagang, Rasulullah telah melakukan perjanjian atau akad mudharabah dengan Siti Khadijah yang kemudian hari Siti Khadijah menjadi istri Rasulullah yang pertama.

Dalam prakteknya perjanjian mudharabah antara Khadijah dengan Nabi Muhammad S.A.W. saat itu Khadijah telah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi keluar negeri,²⁵ dari sejarah tersebut dapat dipahami bahwa Khadijah adalah pemilik modal 100 % dan Nabi berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian atau akad mudharabah merupakan persetujuan perkongsian antara harta dari salah satu pihak dengan kerja atau pengelola usaha dari pihak lain. Dalam kitab suci Al-Qur'an ummat Islam dianjurkan untuk mencari harta di seluruh penjuru bumi dengan cara yang benar dan halal, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-muzammil ayat (20) yang artinya sebagai berikut:



²⁵ Adiwarman, A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004,hlm. 123

20. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka dia memberi keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

[illegible]

16

Di antara sunnah Nabi yang berkaitan dengan perjanjian mudharabah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda :

Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan muqharadah (nama lain dari Mudharabah), mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan keluarga atau rumah tangga bukan untuk dijual.²⁶

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, sebagai berikut :

Bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana kemitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut, disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah S.A.W dan Rasulullah pun membolehkannya.²⁷

Dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang pembiayaan mudharabah di perbankan syariahlandasan bagi *mudharib* serta *sahibul maal* dalam melakukan perjanjian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) telah semakin memiliki landasan hukum, hal ini merupakan era baru bagi usaha perbankan syariah di Indonesia.²⁸

²⁶ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Op Cit*, hlm. 75

²⁷ *Ibid*, hlm. 74

²⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 25 huruf a

Dalam konsep perjanjian mudharabah dalam fiqh muamalah, ulama berbeda pendapat tentang rukun dari mudharabah tersebut, pada pandangan ulama Hanafiyah bahwa rukun perjanjian mudharabah tersebut hanya ijab dan qabul saja, sedangkan menurut Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah itu adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berjanji (berakad), yaitu shahibul maal (pemilik modal) dan Mudharib (pengelola usaha).
2. Modal (maal).
3. Shighat²⁹.

E. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan dalam Islam merupakan perintah dalam Al-Qur'an dan ucapan dari Nabi Muhammad S.A.W, jadi hukum Islam berasal dari teks yang terungkap dari sebuah norma yang saling berhubungan yang melarang kegiatan pengambilan keuntungan (*intrest making*) dan kegiatan spekulatif yang tidak pantas.³⁰

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang artinya memukul atau berjalan, pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.³¹

²⁹ Rahmat Syafi'i, *Op Cit*, hlm. 226

³⁰ Bismar Nasution, *Hukum dan Ekonomi*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema 'Signifikansi Hukum Islam Dalam Merespon Issu-issu Global', di Pascasarjana IAIN SU Medan, tanggal 19 juni 2004, hlm. 11

³¹ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*, *Op Cit*, hlm. 65

Mudharabah secara umum yang terdapat dalam kitab fiqhiyah dan perbankan syariah yaitu sistem pendanaan operasional realitas bisnis, dimana baik sebagai pemilik modal biasanya disebut *shahibul maal* dengan menyediakan modal 100 % kepada pengusaha sebagai pengelola disebut sebagai *mudharib* untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang disebutkan dalam akad mereka.³²

Jika ada mengalami kerugian setelah adanya pengelolaan usaha oleh *mudharib* bukan karena kelalaian yang disengaja atau terjadi kerugian di luar kontrol *entrepreneur* maka investor (*shahibul maal*) akan menanggung seluruh kerugian tersebut, karena kegiatan investasi ini lazim di lakukan oleh *investment banking* bukan kegiatan yang dilakukan *commercial banking*.³³

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk usaha yang produktif.³⁴ Dalam kegiatan penyaluran dana oleh bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan, disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan dan keuntungan yang diperoleh bergantung kinerja *Entrepreneur* dan usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah/mudharib atau mudharib yang membutuhkan dan layak untuk memperoleh pembiayaan tersebut. Maka mekanisme daripada

³² Ascaya Diana Yunita, *Bank Syari'ah: Gambaran Umum* (Jakarta: PPSK BI, 2005), hlm. 21

³³ Zulkarnain Sitompul, *Kemungkinan penerapan Universal Banking Syari'ah Di Indonesia, Kajian Dari perspektif Bank Syari'ah*, Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 20, Agustus-September 2002, hlm. 4

³⁴ Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, *Op Cit*, hlm. 40

pembiayaan mudharabah pada dasarnya terletak pada kerja sama yang baik antara bank syariah dan mudharib. Pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah/mudharib, terutama pengusaha kecil diharapkan akan mampu meningkatkan dan membesarkan usaha mereka sehingga manfaat yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, baik pihak bank syariah maupun para pengusaha tersebut.

Tugas pokok bank syariah pada umumnya memberikan fasilitas atau *intermediary* dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dan memberikan pembiayaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan, maka sistem pembiayaan pada bank syariah merupakan suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang berhubungan dengan proses penyediaan uang berdasarkan kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak. Pada Bank Muamalat Cabang Pekanbaru menerapkan sistem pembiayaan mudharabah terhadap usaha-usaha yang dianggap akan memberikan keuntungan, baik terhadap bank maupun kepada pengusahanya. Untuk itu Bank Muamalat Cabang Pekanbaru lebih cenderung memberikan pembiayaan mudharabah yang tujuan usahanya sebagai berikut :

1. Modal usaha Koperasi
2. Usaha Pertambangan
3. Usaha Industri
4. Usaha Listrik, Gas dan Air
5. Usaha Konstruksi
6. Usaha Perdagangan
7. Usaha Transportasi dan komunikasi

8. Usaha Pertanian

9. Usaha Jasa Usaha Sosial

Secara umum pembiayaan dalam bank syariah menurut sifat penggunaannya di bagi kepada dua bagian sebagai berikut :

1. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu, untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.³⁵ Dan menurut keperluannya pembiayaan produktif ini dibagi menjadi dua hal yaitu :

- 1).Pembiayaan modal kerja,yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan sebagai berikut
 - a). Peningkatan produksi baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
 - b). Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *Utility of place* dari suatu barang.

Pembiayaan modal kerja yang dilaksanakan oleh bank syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja nasabah bukan dengan meminjamkan uang tunai, tetapi dengan menjamin hubungan kemitraan (*partnership*) dengan nasabah.³⁶

Bank bertindak sebagai penyandang dana sedangkan pengusaha sebagai pengelola. Hal ini dapat disebut dengan sistem pembiayaan mudharabah atau dalam istilahnya *trust financing*. Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasilnya secara

³⁵ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek, Op Cit*, hlm. 160

³⁶ *Ibid*, hlm. 162

periodik dengan nisbah wajar yang disepakati dalam akad. Setelah jatuh tempo nasabah nasabah/mudharib mengembalikan sejumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil yang belum dibagikan.

2. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada nasabah/mudharib untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan perluasan usaha(ekspansi), pada umumnya pembiayaan ini diberikan dalam jumlah besar serta pengendapan dana ini cukup lama, sehingga perlu disusun proyeksi arus kas (*projected cash flow*) yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Setelah itu baru disusun jadwal amortisasi yang merupakan angsuran pembiayaan.

3. Pembiayaan komsumtif

Pembiayaan komsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut, bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk memenuhi kebutuhan barang-barang konsumsi.

Dalam proses pembiayaan yang dimohonkan oleh nasabah/mudharib akan diteruskan pihak bank. Jika bank syariah telah meneliti dan merasa yakin bahwa nasabah/mudharib yang akan menerima pembiayaan akan mampu dan mau mengembalikan dana yang telah diterimanya. Hal

tersebut dapat dilihat dari faktor kemampuan dan kemauan dari nasabah/mudharib. Dari kemampuan dan kemauan tersebut akan tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan, dan kedua unsur ini saling terkait satu sama lain. Keamanan atau *safety* mencerminkan bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang akan terjamin dalam pengembaliannya, sehingga keuntungan atau *profitability* akan menjadi kenyataan seperti yang diharapkan karena pada dasarnya *profitability* merupakan tujuan dari pembiayaan tersebut. Berdasarkan dari kepentingan dan tujuan pembiayaan pihak bank syariah harus memperhatikan unsur-unsur yang meliputi, sebagai berikut :³⁷

- a). Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank syariah bahwa prestasi yang akan diberikan oleh nasabah/mudharib, baik dalam bentuk uang atau barang akan benar-benar diterimanya kembali dalam waktu yang telah ditentukan oleh kedua pihak yang terkait. Tuntutan untuk saling percaya dalam pembiayaan mudharabah begitu urgen dan penting, sebab dalam pembiayaan mudharabah pihak bank mempunyai risiko yang sangat tinggi dan juga berpotensi dalam menghadapi permasalahan *assymmetric information* atau dalam istilah lain *moral hazard*.

Dengan demikian pihak bank syariah tidak dapat begitu saja menyalurkan dana kepada mudharib, tanpa terlebih dahulu memperoleh keyakinan bahwa mudharib tersebut amanah dan mampu untuk mengembalikan dana yang dipinjam dan memenuhi makna keuntungan.³⁸

³⁷ *Ibid*, hlm. 168.

³⁸ Adiwarman,A.Karim, *Op Cit*, hlm. 214

- b). Waktu, yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang, dalam hal waktu ini terkandung pengertian bahwa nilai uang pada saat sekarang akan lebih tinggi nilainya dari pada uang yang diterimanya pada masa yang akan datang.
- c). *Degree risk*, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterimanya di kemudian hari, semakin lama pembiayaan yang diberikan akan semakin tinggi pula tuntutan risiko yang akan muncul, maka masih selalu unsur ketidak tentuan yang tidak dapat diperhitungkan, inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko, dengan unsur ini jugalah yang menimbulkan adanya jaminan dalam pembiayaan mudharabah.³⁹

F. Jenis-Jenis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah

Secara umum pembiayaan mudharabah dibagi kepada dua jenis, yaitu :

1. Pembiayaan mudharabah mutlhaqah (*General investment*)

Pembiayaan secara mudharabah muthlaqah adalah suatu pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara shahibul maal dalam hal ini bank syariah dengan mudharib atau nasabah yang cakupannya amat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis,

³⁹ *Ibid*, hlm. 210

kalau dalam pembahasan ulama fiqh *salafussaleh* seringkali menyebutnya dengan contoh “*if al ma syi’ta*” artinya lakukan sesukamu.⁴⁰

Pada pembiayaan mudharabah mutlaqah ini pihak bank syariah tidak menentukan bentuk usaha, waktu dan daerah bisnis mudharibnya. Hal ini diserahkan sepenuhnya kepada pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya sehingga boleh dikatakan dana yang diberikan oleh bank syariah tersebut dapat dikelola oleh mudharib tanpa campur tangan pihak bank. Maka jenis usaha yang akan dijalankan secara mutlak diputuskan oleh mudharib yang dianggap sesuai, sehingga tidak terikat dan terbatas, tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilakukan mudharib tanpa seijin bank syariah yaitu nasabah atau mudharib tidak boleh meminjamkan modalnya atau memudharabakkannya lagi kepada pihak lain.⁴¹

2. Pembiayaan mudharabah muqayyadah

Pembiayaan mudharabah muqayyadah disebut juga dengan istilah *retrected mudharabah/specified mudharabah*, yaitu kebalikan dari pembiayaan mudharabah mutlaqah, dalam pembiayaan ini mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, tempat usaha.⁴²

Untuk jenis pembiayaan mudharabah muqayyadah ini pihak bank syariah dapat memberikan batasan-batasan yang sudah baku kepada nasabah/mudharib, namun di dalam Bank Muamalat Cabang Pekanbaru, pembiayaan Mudharabah muqayyadah ini tidak ada dilaksanakan.

⁴⁰ Antonio, Muhammad Syafi’i, *Bank Syari’ah Wacana Ulama Dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia Islami dan BI,1999), hlm.173

⁴¹ Ascary, *Akad dan Produk Bank Syari’ah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo,2007), hlm.65

⁴² Antonio, Muhammad Syafi’i, *ibid* ,hlm. 173.

Sesuai hasil pantauan kami karena kami adalah Kru di Bank Muamalat Cabang Pekanbaru pembiayaan yang jenis kedua ini tidak ada dan jenis pembiayaan yang di pilih diminati adalah pembiayaan mudharabah muthlaqah.

G. Kriteria Penerima Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah

Berdasarkan prinsip mudharabah bank syariah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana tersebut, sehingga langkah-langkah dalam proses penyaluran pembiayaan mudharabah ini sesuai dengan karakter dan standart dalam penyaluran dana. Sebelum memberikan pembiayaan pihak bank syariah melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap calon mudharib atau nasabah/mudharib yang mengajukan permohonan pembiayaan. Hal ini dilakukan agar pembiayaan yang diberikan selalu memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Keamanan pembiayaan (*safety*) yaitu harus benar diyakini bahwa pembiayaan tersebut dapat dilunasi kembali.
2. Terarahnya tujuan pembiayaan, yaitu bahwa pembiayaan akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3. Menguntungkan, baik untuk bank sendiri maupun kepada mudahrib atau nasabah/mudharib dengan semakin berkembangnya usaha mereka.⁴³

⁴³ Ascary, *Akad dan Produk Bank Syari'ah, Op Cit*, hlm. 69

Awal dari proses pemberian pembiayaan pada bank adalah ketika para calon nasabah/mudharib telah mengajukan terlebih dahulu permohonan pembiayaan kepada bank syariah. Pada prinsipnya permohonan pembiayaan ini berfungsi sebagai bukti adanya permohonan dari perorangan atau badan usaha kepada bank dengan catatan bahwa permohonan tersebut menyertakan lampiran-lampiran sebagai informasi dalam evaluasi dari pemberian pembiayaan. Langkah-langkah yang di ambil oleh bank syariah dalam pembiayaan pada saat calon nasabah/mudharib menyampaikan atau mengajukan usul permohonan pinjamannya, adalah sebagai berikut:

a. Tahap Permohonan Pembiayaan

Pada Umumnya setiap orang atau badan usaha yang memerlukan pinjaman atau pembiayaan dari bank syariah harus mengajukan suatu permohonan pembiayaan kepada bank, pengajuan permohonan ini dapat ditempuh dengan berbagai cara, yaitu :

- 1). Menulis surat permohonan
- 2). Mengisi daftar isian pertanyaan yang disediakan oleh pihak bank syariah.
- 3). Menulis surat terlebih dahulu, lalu disusul dengan mengisi pernyataan.⁴⁴

Pada surat permohonan pembiayaan tersebut harus mencantumkan alasan mengajukan permohonan pembiayaan, jumlah dana yang diperlukan, kesanggupan untuk membayar kembali pinjamannya sesuai dengan rencana yang ditetapkan, jaminan yang disediakan dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. Surat permohonan tersebut akan dicatat dalam buku

⁴⁴ Rahmat Syafi'i, *Op Cit*, hlm. 68

register permohonan pembiayaan di bagian Service Assistance yang selanjutnya di proses oleh para Representatif Manager Lending.

Pada tahap ini bank syariah akan memeriksa kelengkapan berkas permohonan pembiayaan yang dimohonkan oleh nasabah/mudharib sesuai dengan kebutuhan analisis yang diperlukan. Yang tidak kalah pentingnya adalah meneliti keabsahan surat permohonan pembiayaan, apakah telah ditanda tangani oleh pengurus atau yang berwenang sesuai dengan akte pendirian perusahaan.⁴⁵

b. Tahap Penelitian Berkas Investigasi Pembiayaan

Selain melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonan pembiayaan yang diajukan akan dilakukan juga peninjauan ke lapangan, seperti lokasi kantor, lokasi usaha akan diperiksa kebenarannya yang meliputi posisi lokasi apakah di tempat yang strategis, berorientasi konsumen atau berorientasi bahan baku.⁴⁶

Pada waktu melaksanakan peninjauan lapangan, dilakukan pengecekan kebenaran atas data-data laporan yang telah disampaikan baik data-data non keuangan seperti data lokasi bangunan. Data jumlah pegawai dan fasilitas-fasilitas lainnya serta data keuangan yang meliputi rincian dari komponen-komponen aktiva lancar, aktiva tetap dan sebagainya.

c. Analisis Pembiayaan

⁴⁵ Sunarto Zulkifli, *Panduan Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul hakim, 2003) hlm. 144

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 143

Sesuai dengan wawancara yang diperoleh dari Bank Muamalat Pekanbaru. Pihak Bank Muamalat Pekanbaru dalam menetapkan kriteria pertama yang harus dipenuhi oleh penerima pembiayaan mudharabah adalah :

1). Orang atau badan usaha harus *Amanah*

Maksud amanah disini yaitu, bahwa orang atau badan usaha calon nasabah/mudharib tersebut dapat dipercaya atau diyakini mampu dalam mengelola dana yang di berikan dengan benar dan diharapkan akan memberikan keuntungan.

Dalam ajaran Islam amanah merupakan cerminan kepribadian seorang muslim sejati, baik ketika berusaha maupun dalam janji yang telah dibuat. Dengan adanya sifat amanah dalam diri nasabah/mudharib akan membuat investor yaitu Bank Muamalat Pekanbaru merasa aman dan tidak khawatir ketika memberikan pembiayaan mudharabah. Dalam ilmu Psikologi di kenal teori bahwa manusia beraksi terhadap apa yang dipercayainya sebagai suatu kenyataan dan terhadap kenyataan itu sendiri.⁴⁷

Dengan pengertian lain amanah atau kepercayaan yang di jaga nasabah/mudharib dengan baik akan memberikan keuntungan dan melahirkan peluang usaha yang lebih besar lagi. Namun pada satu sisi, sangat sulit untuk menentukan amanah atau tidaknya calon nasabah/mudharib tersebut sebagaimana yang dikriteriakan Bank Muamalat Cabang Pekanbaru sebab amanah itu tidak bisa diukur dengan bagus dan aktifnya pelaporan yang diberikan nasabah/mudharib.

⁴⁷ Bismar Nasution, *Pengembangan Ekonomi Islam Dan Kualitas Hukum Konvensional*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema ‘*Signifikansi Hukum Islam Dalam Merespon Issu-issu Global*’, di Pascasarjana IAIN SU Medan, tanggal 19 juni 2004, hlm. 2

2). Telah menjadi nasabah di Bank Muamalat Pekanbaru minimal satu (1) tahun.

Dalam hal ini pihak Bank Muamalat Cabang Pekanbaru menganalisa calon nasabah/mudharib melalui perputaran nilai keuangannya selama satu tahun tersebut, apakah calon nasabah/mudharib tadi layak atau tidak menerima pembiayaan mudharabah. Namun dalam melaksanakan analisis terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan kepadanya, bank syariah setidaknya harus memuat analisis 5 C yang merupakan standarisasi minimal yang lazim dipergunakan di kalangan perbankan, cakupan analisis 5 C tersebut adalah :

a). *Character*

Pada tahap ini dilakukan untuk menilai moral, waktu atau sifat-sifat yang positif, kooperatif, kejujuran dan rasa tanggung-jawab dalam kehidupan pribadi sebagai anggota masyarakat dan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Penilaian ini dilakukan dengan cara meneliti daftar riwayat hidup, reputasi di lingkungan usaha, informasi antar bank, informasi pada asosiasi usaha yang bersangkutan dalam masyarakat baik yang sifatnya positif maupun negatif.

b). *Capacity*

Penilaiannya bersifat subjektif tentang kemampuan usaha perorangan atau badan usaha untuk melunasi hutang dan kewajiban lainnya tepat pada waktunya, sesuai dengan perjanjian dan hasil usaha yang diperoleh. Dalam penilaian ini didasarkan atas kemampuan nasabah/mudharib pada masa sebelumnya, kemampuan berproduksi, keuangan dan manajemen termasuk juga penilaian kemampuan riil nasabah/mudharib di lapangan, pabrik, toko dan lain-lainnya.

c). *Capital*

Penilaian atas kemampuan keuangan nasabah/mudharib, jumlah dan atau modal yang dimiliki oleh calon nasabah/mudharib dalam artian kemampuan untuk menyertakan dana sendiri atau modal sendiri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan, akta pendirian dan akta perubahan, sedangkan untuk usaha perorangan dapat diketahui dengan jalan mengurangi total harta dengan total hutangnya kepada pihak ketiga.

d). *Collateral*

Collateral adalah jaminan atau kemampuan nasabah/mudharib untuk menyerahkan barang jaminan sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang akan diberikan.⁴⁸ Di dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah memang tidak dinyatakan shahibul maal dalam hal ini bank syariah untuk meminta jaminan kepada pihak nasabah/mudharib, akan tetapi biasanya bank syariah akan meminta jaminan demi keamanan dalam pembiayaan yang diberikan dengan prinsip kehati-hatian. Kemudian di dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka (26) menyebutkan bahwa agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan atau unit usaha syariah guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah yang difasilitasi.⁴⁹

e). *Condition of Economic*

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 147

⁴⁹ Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah

Pada tahap ini bank dapat menganalisis kondisi ekonomi makro yang meliputi kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain pada suatu saat tertentu atau periode tertentu termasuk peraturan pemerintah setempat.⁵⁰

Dalam perkembangannya para analis juga menambahkan unsur-unsur yang keenam yaitu “*Constraint*” yaitu analisis terhadap keterbatasan atau hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan usaha di satu tempat. Selain unsur di atas dalam pemberian pembiayaan ini memerlukan analisis risiko pembiayaan mudharabah yang terdiri dari:

(1). Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Pada umumnya risiko pembiayaan ini mencakup kepada risiko produk.

Untuk penilaian risiko pembiayaan ini mencakup tentang risiko bisnis yang dibiayai yakni risiko yang terjadi pada karakteristik masing-masing jenis usaha nasabah/mudharib dan kinerja keuangan jenis usaha nasabah/mudharib, risiko berkurangnya nilai pembiayaan yaitu risiko yang dipengaruhi oleh penurunan yang drastis dari tingkat penjualan, harga jual barang/jasa dari bisnis nasabah/mudharib dan risiko karakter buruk mudharib yaitu risiko pembiayaan yang dipengaruhi oleh kelalaian, pelanggaran nasabah/mudharib dalam menjalankan bisnis yang dibiayai serta pengelolaan perusahaan yang tidak profesional sesuai standar pengelolaan yang di sepakati antara bank dan nasabah/mudharib.⁵¹

⁵⁰ Sunarto Zulkifli, *Op Cit*, hlm. 146

⁵¹ Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, *Op Cit*, hlm. 266

(2). Resiko Pasar

Resiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variable pasar berupa suku bunga dan nilai tukar.⁵²

Resiko pasar ini dapat dibagi kepada tiga hal yaitu:

Pertama, resiko tingkat suku bunga merupakan risiko yang timbul sebagai akibat dari fluktuasi tingkat bunga. Meskipun pada bank syariah tidak mengenal bunga untuk pembiayaan tetapi bank syariah tidak akan dapat terlepas dari risiko ini sebab pasar yang dijangkau oleh bank syariah tidak hanya nasabah-nasabah yang loyal sepenuhnya terhadap syariah.

Kedua, resiko pertukaran mata uang adalah suatu konsekuensi sehubungan dengan pergerakan atau fluktuasi nilai tukar terhadap rugi laba bank. Walaupun pada aktivitas syariah tidak terpengaruh oleh kurs secara langsung karena ada syarat tidak boleh melakukan transaksi yang bersifat spekulasi tetapi bank syariah tidak dapat terlepas dari adanya posisi dalam valuta asing.

Ketiga, risiko harga yaitu kemungkinan kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan, risiko ini terjadi terkait risiko harga barang yang naik turun akibat dari minat nasabah/nasabah/mudharib dalam menjalankan bisnis.

(3). Resiko Likuiditas

⁵² *Ibid, hlm. 272*

Resiko likuiditas adalah resiko yang disebabkan antara lain oleh ketidak mampuan bank untuk memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo.⁵³

(4). Resiko Operasional

Resiko operasional adalah risiko yang disebabkan antara lain karena ketidak cukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.⁵⁴

(5). Resiko Reputasi

Resiko reputasi ini terjadi antara lain akibat dari adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif yang terkait dengan kegiatan calon nasabah/mudharib.⁵⁵

Hal-hal yang mempengaruhi terhadap reputasi tersebut antara lain masalah manajemen nasabah/mudharib, pemegang sahamnya, pelayanan, penerapan prinsip syariah dan publikasi. Sedangkan alasan turunnya reputasi nasabah/mudharib tersebut bisa terjadi karena kesalahan manajemen, melanggar peraturan, melanggar fatwa DSN, pernah terlibat skandal keuangan, *integritas* yang diragukan dan *performance* keuangan yang kurang baik.

(6). Resiko Kepatuhan

Resiko kepatuhan merupakan resiko yang disebabkan oleh ketidak patuhannya terhadap ketentuan-ketentuan yang ada, seperti ketentuan batas maksimum pembiayaan, ketentuan

⁵³ *Ibid, hlm. 274*

⁵⁴ *Ibid, hlm. 275*

⁵⁵ *Ibid, hlm. 275*

dalam pemberian pembiayaan, ketentuan perpajakan, ketentuan dalam akad dan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional.⁵⁶

(7). Resiko Strategik

Resiko strategik adalah resiko yang disebabkan antara lain karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategi yang tidak baik dan tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau tidak mematuhi/melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Maka indikasi dalam resiko ini dapat dilihat dari kegagalan dalam mencapai target bisnis yang telah ditetapkan baik target keuangan maupun non keuangan.

(8). Resiko Hukum

Resiko hukum merupakan risiko yang disebabkan karena adanya kelemahan aspek yuridis, seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau lemahnya perjanjian dengan tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu akad atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Setelah melewati semua tahap analisis tersebut maka pihak bank dapat mengambil keputusan apakah permohonan calon nasabah/mudharib tadi dapat diterima atau ditolak. Pada kebiasaanya bila bank telah memperoleh keyakinan atas calon nasabah/mudhari, maka pihak bank akan mengirimkan surat kepada nasabah/mudharib yang disebut *offering letter* yang memuat ketentuan-ketantuan dari bank mengenai permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah/mudharib yang dapat diterima oleh bank yang isinya antara lain, jumlah pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank, jangka waktu pembayaran, jumlah angsuran dan

⁵⁶ *Ibid, hlm. 276*

ketentuan lainnya. Terhadap *offering letter* yang diberikan oleh bank kepadanya, calon nasabah/mudharib diberi kesempatan untuk mempelajari syarat-syarat yang diajukan oleh bank. Namun pada kondisi ini calon nasabah/mudharib tetap masih dapat merundingkan hal-hal yang belum sesuai menurutnya dengan pihak bank agar diantara kedua belah pihak tercapai kata sepakat. Apabila terjadi penolakan dari pihak bank terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah/mudharib maka akan berlaku beberapa hal sebagai berikut:

- a). Penolakan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada calon nasabah/mudharib beserta dengan alasan-alasannya.
- b). Pengembalian semua berkas permohonan, kecuali surat permohonan pembiayaan.
- c). Bila yang ditolak oleh bank adalah permohonan perpanjangan pembiayaan maka hal itu berarti jangka waktu dari pembiayaan tersebut tidak bisa diperpanjang lagi, dengan demikian nasabah/mudharib diberitahukan agar segera menyelesaikan semua kewajibannya.
- d). Bila permohonan tambahan fasilitas pembiayaan ditolak, nasabah tetap dapat menikmati limit dari fasilitas pembiayaan yang telah disetujui semula.⁵⁷

Setelah pihak bank dan nasabah/mudharib telah menemui kata sepakat dalam hal pemberian pembiayaan oleh bank kepada nasabah/mudharib maka kesepakatan yang terjadi pada para pihak tersebut akan dituangkan dalam suatu perjanjian pembiayaan. Dalam arti perjanjian pembiayaan tersebut adalah suatu perbuatan hukum antara pihak bank di satu pihak dengan nasabah/mudharib di pihak lain, yang mana isi perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis agar memudahkan pembuktian bila terjadi wanprestasi dikemudian hari. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang No.10 Tahun 1998, perjanjian pembiayaan atau persetujuan akad pembiayaan dibuat secara kontraktual berdasarkan pinjam-meminjam yang

⁵⁷ Sunarto Zulkifli, *Op Cit*, hlm. 150

diatur dalam buku III bab 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu ketentuan mengenai berakhirnya perikatan, dalam hal ini Pasal 1381 KUH Perdata berlaku juga dalam Perjanjian pembiayaan ini, kecuali ditentukan lain oleh para pihak yang dituangkan dalam akad. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa pembiayaan mudharabah ini sangat rentan dan berpotensi terhadap *Moral Hazard* dari pelaku usaha atau mudharib, untuk itu pihak bank syariah perlu mengadakan pengawasan yang meliputi sebagai berikut:

Pertama, Bank mengevaluasi permohonan mudharabah dari calon nasabah/ mudharib melalui kelayakan dan survey lokasi.

Kedua, Bank membuat perjanjian tentang proyeksi pengembalian berikut bagi hasil yang akan diterima bank dan nasabah/mudharib.

Ketiga, Nasabah menjalankan usahanya dan selanjutnya melakukan pembayaran bagi hasil secara periodik sesuai dengan besarnya keuntungan dan nisbah yang disepakati.

Keempat, Nasabah dapat melakukan cicilan atau pembayaran sekaligus terhadap jumlah pembayaran dana pinjaman.⁵⁸

Setiap bank syariah tentu menginginkan keuntungan yang tinggi, karena beroperasi dan berhasilnya suatu bank dapat dilihat melalui keuntungan yang diperoleh. Akan tetapi tingkat keuntungan bersih yang dihasilkan tidak terlepas dari pengaruh dan faktor-faktor yang dapat dikendalikan dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pihak bank syariah itu sendiri.

H. Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah

⁵⁸ Adiwarman,A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan,Op Cit*, hlm. 216

Jaminan pembiayaan mudharabah merupakan tuntutan kepada mudharib untuk mengembalikan modal shahibul maal dalam keadaan semula baik untung maupun rugi ⁵⁹.

Pihak bank syariah mengambil banyak langkah atau cara untuk memastikan bahwa modal yang disalurkan dan keuntungan yang diharapkan dari modal tersebut dapat diperoleh sebagaimana yang telah tercantum dalam kontrak. Keadaan ini biasanya diwujudkan melalui jaminan baik dari mudharib sendiri maupun ada dari pihak ketiga yang menjaminkannya, walaupun sebenarnya dalam fiqh Islam tidak dituntut untuk meminta jaminan kepada nasabah/mudharib, akan tetapi bank-bank syariah pada umumnya meminta berupa bentuk jaminan, hal ini dilakukan pihak bank syariah untuk menegaskan jaminan tersebut ada hanya untuk memastikan kembalinya modal, sebab dana yang diberikan kepada nasabah/mudharib itu adalah pada umumnya dana yang dihimpun dari masyarakat luas.

Sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah dinyatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan Mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta Jaminan dari Mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. ⁶⁰

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 177

⁶⁰ Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, *Op Cit*, hlm. 45

Maka untuk memastikan kinerja nasabah/mudharib sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat dalam kontrak, biasanya pihak bank mempersyaratkan bagi pemohon pembiayaan mudharabah untuk menyatakan jenis jaminan yang dapat mereka berikan kepada bank syariah.⁶¹

Adanya jaminan atau penjamin dari nasabah/mudharib kepada pihak bank syariah bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko-risiko seperti nasabah/mudharib tidak mempergunakan dana yang diberikan sebagaimana mestinya atau hanya memberikan keuntungan pembiayaan tersebut kepada dirinya pribadi saja atau yang dikenal dengan *Moral Hazard*. Maka bank syariah dapat menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada nasabah/mudharib antara lain:

1. Menetapkan syarat agar jumlah atau nilai jaminannya lebih besar dari modal yang dipinjam oleh nasabah/mudharib.
2. Menetapkan syarat agar nasabah/mudharib melakukan bisnis yang risikonya lebih rendah.
3. Menetapkan syarat agar nasabah/mudharib melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan.
4. Menetapkan syarat agar nasabah/mudharib melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah.⁶²

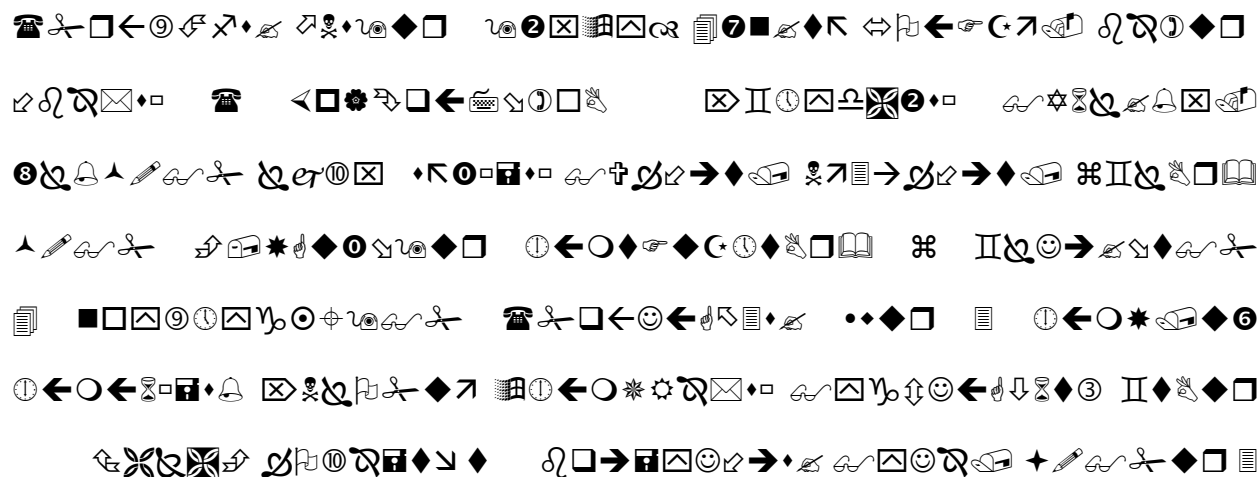
Penyerahan jaminan untuk pembiayaan mudharabah ini harus dipenuhi oleh nasabah/mudharib kepada bank syariah dalam rangka mengamankan dana masyarakat dan

⁶¹ Abdullah Saed, *Menyoal Bank Syari'ah, Kritikan atas Interpretasi Bunga Bank Neo-Revivalless*, Op Cit, hlm. 86

⁶² Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Op Cit, hlm. 214

kepercayaan yang diberikan terhadap bank syariah sebagai pengelola uang yang terhimpun tadi.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat (283) menyebutkan yang artinya sebagai berikut:



283. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶³

Adapun jenis jaminan tambahan tersebut dapat berupa :

a. Barang bergerak berwujud, meliputi :

- 1). Barang dagangan.
- 2). Inventaris Perusahaan
- 3). Kendaraan bermotor.
- 4). Perhiasan seperti emas dan sebagainya.⁶⁴

b. Barang tidak bergerak seperti :

⁶³ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op Cit, hlm. 65

⁶⁴ Abdul Ghofur Ansory, *Op Cit*, hlm. 148

- 1). Tanah
 - 2). Bangunan
- c. Barang bergerak tidak berwujud, berupa Deposito
- d. Borgtoch/Penjamin (penggaransi) berupa :
- 1). Jaminan perorangan (*Personal Guarantee*).
 - 2). Jaminan dari Perusahaan (*Coorporate guarantee*)
 - 3). Jaminan dari Pemerintah ⁶⁵

Pihak bank biasanya akan lebih mudah untuk memberikan pembiayaan kepada pihak nasabah/mudharib bila pihak bank sudah mengenal nasabah/mudharib terlebih dahulu seperti bila nasabah/mudharib adalah merupakan nasabah penabung di bank bersangkutan, pada simpanan deposito nasabah/mudharib bisa dijadikan sebagai jaminan kepada bank.

Dalam hal ini nasabah/mudharib akan mendapatkan minimal dua keuntungan pertama dalam hal depositonya, ia akan mendapatkan bagi hasil dari bank atas keuntungan yang di dapat oleh bank, dan yang kedua nasabah/mudharib akan memperoleh tambahan modal dari pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk usahanya. Keuntungan atau kemudahan yang di dapat oleh pihak bank bahwa jaminan tambahan berupa deposito nasabah/mudharib berada pada bank yang bersangkutan sehingga bank lebih mendapat kepastian bagi pelunasan hutang nasabah/mudharib dikemudian hari sesuai dengan akad pembiayaan.

⁶⁵ Ibid, hlm. 149

Dengan keuntungan yang didapat oleh bank merupakan keuntungan juga pihak nasabah dan berpengaruh kepada besarnya nilai bagi hasil yang diterima oleh kedua belah pihak sehingga akan menarik minat masyarakat lainnya untuk menyimpan atau menginvestasikan uangnya pada bank syariah tersebut karena otomatis dana yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat juga lebih besar.⁶⁶

Terhadap keadaan nasabah/mudharib tertentu dan pihak bank telah memiliki keyakinan yang cukup terhadap kemampuannya maka bank dapat menerima jaminan tambahan yang diberikan oleh nasabah/mudharib berupa proyek yang dibiayai dari pembiayaan yang diberikan bank tersebut, juga dengan hak tagih dari nasabah/mudharib yang timbul dalam usahanya tersebut. Untuk lebih menjamin pengembalian dana yang diberikan pihak bank kepada nasabah/mudharib, pihak bank dapat menyarankan kepada nasabah/mudharib supaya untuk memasukkan proyek pembiayaan atau usaha yang dikelola nasabah/mudharib tersebut ke asuransi seperti syariah Takaful, hal ini berguna untuk menjamin ketika sewaktu-waktu nasabah/mudharib mengalami musibah maka pihak asuransi akan melunasi hutangnya, dengan kata lain tagihan hutang dari nasabah/mudharib tersebut akan beralih kepada pihak asuransi.

I. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Muamalat Cabang Pekanbaru

Perjanjian mudharabah merupakan salah satu produk bagi hasil yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat Pekanbaru, dengan berdasarkan prinsip syariah pada umumnya. Bank Muamalat

⁶⁶ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 261

Pekanbaru lebih menekankan kepada pembiayaan mudharabah terhadap usaha Koperasi Pegawai Negeri, pertanian, pertambangan, industri, listrik, Gas dan Air, konstruksi atau proyek, perdagangan, transportasi dan komunikasi, jasa dunia usaha, usaha jasa sosial, namun tetap tidak mengesampingkan pembiayaan terhadap usaha-usaha yang lain sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.⁶⁷

Secara umum perjanjian pembiayaan mudharabah di bank syariah terdiri dari beberapa unsur yaitu :

1. Bank syariah bertindak sebagai shahibul maal secara penuh dan nasabah/ mudharib sebagai pengelola kegiatan dalam usaha.
2. Jangka waktu pembiayaan, yaitu masa pengembalian dana dan pembagian keuntungan berdasarkan yang disepakati dalam akad/kontrak.
3. Bank syariah tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah/mudharib atau mudharib.
4. Pembiayaan yang diberikan dalam bentuk uang dan dinyatakan jumlahnya.
5. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati bersama.
6. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan tidak berlaku surut.
7. Bank syariah meminta jaminan atau ada orang yang menjamin untuk mengatasi risiko apabila nasabah/mudharib tidak memenuhi kewajiban dengan niat curang atau lalai.⁶⁸

⁶⁷ Hasil pelaksanaan dilapangan oleh Penulis dilapangan

⁶⁸ Abdul Ghofur Ansory, *Op Cit*, hlm.66

Bank Muamalat Cabang Pekanbaru pada prakteknya menerapkan prinsip pembiayaan mudharabah Muthlaqah dengan memberikan fasilitas dan otoritas serta hak sepenuhnya kepada nasabah/mudharib untuk melakukan usaha dan mengelola dana yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah ini sesuai dengan yang diinginkannya dan hal tersebut akan disebutkan dalam perjanjian atau akad/kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk pembiayaan mudharabah muthlaqah ini pihak Bank Muamalat Cabang Pekanbaru membaginya kepada dua kelompok mudharib, yaitu Mudharib perorangan dan Mudharib badan usaha.

Tabel 1. Pembiayaan Mudharabah Muthlaqah di Bank Muamalat Cabang Pekanbaru Tahun 2006 Sampai Dengan Tahun 2010

NO	TAHUN PEMBIAYAAN	JUMLAH NASABAH
1	2005	3
2	2006	11
3	2007	32
4	2008	29
5	2009	13
6	2010	12

Sumber data : Bank Muamalat Cabang Pekanbaru

Dari tabel di atas, terlihat bahwa peningkatan pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Cabang Pekanbaru belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dari segi

kuantitas, hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya prinsip kehati-hatian Bank dalam menyalurkan pembiayaan, mengingat Bank sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dengan menyediakan modal 100 % kepada pengusaha sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang disebutkan dalam akad mereka.⁶⁹

Ketentuan Akad Mudharabah di Bank Muamalat Cabang Pekanbaru Meliputi:

1). Menerangkan pihak-pihak yang hendak berakad/berkontrak.

Pada perjanjian atau akad pembiayaan mudharabah muthlaqah yang dibuat antara nasabah/mudharib dengan Bank Muamalat Cabang Pekanbaru memuat tentang hal-hal sebagai berikut :⁷⁰

Pada tahap ini akan diterangkan dengan jelas pihak-pihak yang akan berakad yaitu Bank Muamalat Cabang Pekanbaru yang akan diwakili oleh pimpinan atau perwakilan dari direksi bank beserta Marketing yang memprosesnya dan bagian Legal (Hukum) dan nasabah/mudharib sebagai orang atau badan usaha yang disebut sebagai penerima pembiayaan, hubungan kepada klausula akad sesudahnya.⁷¹

. Secara umum kebebasan berkontrak mengandung lima (5) makna, sebagai berikut :

⁶⁹ Ascaya Diana Yunita, *Bank Syari'ah: Gambaran Umum* (Jakarta: PPSK BI, 2005), hlm.21

⁷⁰ Akad Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Cabang Pekanbaru, hlm. 1- 3

⁷¹ Unsur-Unsur Perjanjian Dalam Hukum Islam di Bab III.

- a). Kebebasan bagi para pihak untuk mengawali dan mengakhiri kontrak
- b). Kebebasan untuk menentukan dengan siapa para pihak akan membuat kontrak.
- c). Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan bentuk kontrak
- d). Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi kontrak).
- e) Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan cara pembuatan kontrak Artinya melalui penyebutan siapa-siapa yang akan mengikatkan diri dalam kontrak akan memberikan gambaran terhadap tujuan dari pada pembiayaan mudharabah yang di berikan. Peristiwa tentang mengikatkan diri oleh pihak-pihak yang ingin berakad menimbulkan konsekuensi hukum yang hampir senada dengan hukum positif, yaitu adanya kebebasan para pihak untuk membuat satu jenis akad dan mengakhirinya.

2). Menerangkan tentang pembiayaan dan kegunaannya⁷²

Pada tahap ini akan dijelaskan Bank Muamalat Cabang Pekanbaru akan menyediakan dana pembiayaan dalam bentuk uang kepada nasabah/mudharib dengan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak, biasanya Bank Muamalat Cabang Pekanbaru tidak memberikan batasan jumlah pembiayaan, namun untuk nilai minimal dalam pembiayaan mudharabah adalah Rp. 300.000.000 ,- (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).

Sedangkan untuk jumlah maksimumnya Bank Muamalat Cabang Pekanbaru tidak membatasinya, tetapi disesuaikan dengan nilai jaminan yang diberikan oleh nasabah/mudharib. Seperti jaminannya adalah sertifikat tanah dan bangunan, jika nilai harga dari tanah dan bangunan tersebut adalah Rp. 500.000.000,- maka batas maksimal dana yang akan diperoleh

⁷² Akad Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Cabang Pekanbaru, hlm. 6-7

nasabah/mudharib adalah nilai harga tanah dikali 80 %, maka dari hasil tersebut menjadi batas maksimal bagi pembiayaan mudharabah ini.

3). Jangka Waktu Pembiayaan⁷³

Pada klausula akad pembiayaan mudharabah tentang jangka waktu sebenarnya diserahkan kepada pihak nasabah/mudharib, artinya tergantung kemauan dan kemampuan nasabah/mudharib dalam mengemban amanah modal yang diberikan kapan nasabah/mudharib tersebut sanggup menyelesaikan kewajibannya. Pihak nasabah/mudharib bebas menentukan batas waktu pengembalian pembiayaan ini, tetapi biasanya jangka waktu ini dapat dilihat dari sektor usaha yang dikelola nasabah/mudharib, seperti pada proyek pembangunan perumahan atau real estate dalam pembiayaan ini mempunyai jangka waktu yang cukup lama yaitu 5 (lima) tahun, sedangkan dalam proyek pengadaan atau distribusi barang pupuk misalnya hanya membutuhkan jangka waktu 2 (dua) bulan, jadi dalam jangka waktu ini melihat kepada tujuan pembiayaan yang diberikan. Kemudian dalam klausula ini juga dijelaskan kapan berakhirnya pembiayaan dan pengembalian modal yang diberikan Bank Muamalat Pekanbaru kepada nasabah/mudharib.⁷⁴

4). Penarikan Pembiayaan⁷⁵

Penarikan pembiayaan dapat dilakukan sekaligus, baik dengan ditarik tunai maupun dengan mentransfer dana ke rekening bank Muamalat maupun bank lain. .

⁷³ *Ibid*, hlm. 7

⁷⁴ Abdul Ghofur Ansory, *Op Cit*, hlm.3

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 7-8

5). Menerangkan nisbah bagi Hasil pada realisasi pembiayaan

Pembagian keuntungan merupakan hal yang paling urgen dalam satu pembiayaan selain dari pengembalian pokoknya, maka pembayaran nisbah keuntungan dilakukan pada tiap-tiap bulan dengan menyebutkan tanggal pembayaran dan cara pembayarannya, apakah dengan menyetor langsung ke bank atau melalui transfer tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Satu hal yang terpenting Pihak Bank Muamalat Cabang Pekanbaru dan pihak nasabah/mudharib harus menyepakati terlebih dahulu tentang berlakunya nisbah bagi hasil atau pembagian keuntungan berdasarkan dengan akad mudharabah di dalam perjanjian. Artinya dalam tahap ini dijelaskan berapa persen bahagian yang akan diperoleh bank sebagai pemilik modal dan seberapa pula bahagian nasabah/mudharib.

Melihat tujuan pembiayaan mudharabah yang disalurkan Bank Muamalat Cabang Pekanbaru kepada usaha proyek atau konstruksi, usaha produksi, jasa usaha maka porsi bagi hasil antara Muamalat Cabang Pekanbaru dengan nasabah/mudharib adalah 60 % dari hasil keuntungan untuk pihak pengusaha atau nasabah/mudharib dan 40 % bahagian bank.

Usaha perumahan (*real estate*) untuk usaha distributor barang/jasa nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak Bank dan Nasabah. Dari praktek pembagian keuntungan antara Bank Muamalat Cabang Pekanbaru, pada hakekatnya lebih memberikan keuntungan yang lebih banyak kepada pengusaha atau nasabah/mudharib.⁷⁶

⁷⁶ Akad Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Cabang Pekanbaru , hlm. 7

Pemberian keuntungan yang lebih besar kepada pihak nasabah/mudharib merupakan pengamalan dari prinsip syariah tentang keadilan dan asas tolong-menolong dan memberikan kepentingan utama kepada nilai-nilai norma persaudaraan manusia dan keadilan sosial ekonomi.⁷⁷

6). Menerangkan tentang Pembayaran Kembali⁷⁸

Nasabah diminta untuk melunasi biaya-biaya yang timbul akibat perikatan tersebut. Bank akan menyerahkan dana sejumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak Bank sampai lunas sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Jika Nasabah membayar lunas pembiayaan yang diberikan Bank lebih awal dari yang diperjanjikan, tidak berarti pembayaran tersebut menghapuskan atau mengurangi bagian dari pendapatan/keuntungan yang menjadi hak pihak Bank sebagaimana yang telah disepakati.⁷⁹

7). Biaya, Potongan dan Pajak Nasabah / mudharib

Nasabah menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan isi akad, termasuk jasa Notaris dan jasa lain sepanjang hal itu diberitahukan Bank kepada Nasabah sebelum ditanda-tanganinya akad dan nasabah menyatakan persetujuannya. Beban biaya dalam pembuatan akad tidak seharusnya dibebankan kepada pihak nasabah/mudharib semata tetapi juga

⁷⁷ Bismar Nasution, *Pengembangan Ekonomi Islam Dan Kualitas Hukum Konvensional*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema '*Signifikansi Hukum Islam Dalam Merespon Issue- issue Global*', di Pascasarjana IAIN SU Medan, tanggal 19 juni 2004, hlm. 2

⁷⁸ Akad Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Cabang Pekanbaru, hlm. 10

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 11

kepada pihak Bank Muamalat Pekanbaru, sebab yang akan mendapat pembagian keuntungan dalam pembiayaan mudharabah tidak hanya untuk nasabah/mudharib saja tetapi juga pihak bank.

8). Agunan atau jaminan dalam pembiayaan

Kemudian agunan atau jaminan ada agar nasabah/mudharib tidak melakukan penyimpangan. Agunan atau jaminan pada dasarnya tidak dibolehkan dalam pembiayaan mudharabah, karena pada prinsipnya pembiayaan yang diberikan oleh pemilik modal atau shahibul maal adalah untuk membantu sesama. Akan tetapi mengingat bahwa dana yang akan diberikan oleh Bank Muamalat Cabang Pekanbaru kepada nasabah/mudharib tersebut masih termasuk dari dana deposan yang menyimpan uangnya di bank tersebut, maka demi kemashlahatan jaminan diperbolehkan dalam pembiayaan mudharabah.⁸⁰

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan pembiayaan tepat waktu dan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan akad ini, maka Penerima Pembiayaan menyerahkan agunan dan membuat pengikatan jaminan kepada Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini. Selanjutnya demi menjaga kepercayaan yang diberikan deposan kepada Bank Muamalat Cabang Pekanbaru maka Bank Muamalat Cabang Pekanbaru dibenarkan untuk meminta jaminan dari pihak nasabah/mudharib, mengenai bentuk jaminan yang diberikan nasabah/mudharib kepada bank bisa berupa sertifikat tanah, bangunan, kendaraan, mesin, SK

⁸⁰ Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, *Op Cit*, hlm. 45

PNS, satuan barang dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat dalam akad pembiayaan mudharabah Pasal 8 dijelaskan sebagai berikut :⁸¹

9). Kewajiban nasabah/mudharib⁸²

1. Mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/ keuntungan Bank sesuai dengan nisbah pada saat jatuh tempo ; Pada klausula ini dijelaskan Kewajiban nasabah/mudharib adalah :
2. Memberitahukan secara tertulis kepada bank dalam hal terjadinya perubahan yang menyangkut nasabah maupun usahanya ;
3. Melakukan pembayaran atas semua tagihan dari pihak ketiga dan setiap penerimaan tagihan dari pihak ketiga disalurkan melalui rekening nasabah di Bank ;
4. Membebaskan seluruh harta kekayaan milik nasabah dengan beban penjaminan terhadap pihak lain, kecuali penjaminan bagi kepentingan Bank berdasarkan akad ini ;
5. Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan pembiayaan secara jujur dan benar dengan itikad baik dalam pembukuan tersendiri ;
6. Menyerahkan kepada Bank perhitungan usahanya secara bulanan yang di fasilitasi pembiayaannya berdasarkan akad ini selambat-lambatnya tujuh (7) hari bulan berikutnya ;
7. Menyerahkan kepada bank setiap dokumen bahan-bahan dan atau keterangan-keterangan yang di minta Bank kepada nasabah ;
8. Menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan dan tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah .

⁸¹ Akad Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Cabang Pekanbaru, hlm.11

⁸² *Ibid*, hlm. 12

Salah satu unsur terpenting dalam akad pembiayaan mudharabah ini adalah menjelaskan apa-apa yang menjadi kewajiban nasabah/mudharib terhadap bank dalam pengembalian pokok pembiayaan dan hasil keuntungan usaha. Untuk itu keuntungan yang akan diperoleh Bank Muamalat Cabang Pekanbaru sangat berpengaruh kepada pelaporan yang benar dan jujur dari pihak nasabah/mudharib. Kejujuran nasabah/mudharib dalam pembiayaan mudharabah ini bisa di identikkan atau hampir sama dengan prinsip keterbukaan yang dilakukan dalam pasar modal,⁸³

10). Pernyataan Pengakuan Nasabah dimana keterbukaan dari hasil keuntungan yang diperoleh nasabah/mudharib harus dilaporkan sesuai dengan perjanjian yang telah di akadkan.⁸⁴

- a) Nasabah adalah perorangan/badan usaha yang tunduk pada hukum negara Republik Indonesia. Pada klausula akad ini, nasabah menyatakan pengakuan dengan sebenarnya dan menjamin dan karenanya mengikatkan diri kepada Bank.
- b) Nasabah tidak dalam keadaan berselisih, bersengketa, gugat-menggugat di muka atau di luar lembaga peradilan atau arbitrase, berhutang kepada pihak lain, diselidik atau dituntut oleh pihak yang berwajib baik pada saat ini ataupun dalam masa penundaan yang dapat mempengaruhi asset, keadaan keuangan dan atau mengganggu jalannya usaha nasabah .

⁸³ Bismar Nasution, *Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal*, makalah yang disampaikan pada loka karya Pengelolaan Perusahaan (*corporate governance*), kerja sama program Pascasarjana Universitas Indonesia dan University of South Carolina, di Jakarta tanggal 4 Mei tahun 2000, hlm.3.

⁸⁴ Akad Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Cabang Pekanbaru, hlm. 13-14

- c) Orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan atau yang diberi kuasa oleh nasabah adalah sah dan berwenang serta tidak dalam tekanan atau paksaan dari pihak manapun .
- d) Nasabah memiliki semua perijinan yang berlaku untuk menjalankan usahanya .
- e) Nasabah mengizinkan Bank pada saat ini dan untuk masa-masa selama berlangsungnya akad, untuk memasuki tempat usaha dan tempat-tempat lainnya berkaitan dengan usaha nasabah, mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi dan atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha berdasarkan akad ini, baik langsung maupun tidak langsung .

11). Menerangkan Cidera Janji

Dalam perjanjian pembiayaan mudharabah, Bank berhak untuk menuntut/ menagih pembayaran dari nasabah dan atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya atau sebagian atau seluruh jumlah kewajiban nasabah kepada Bank berdasarkan akad, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, teguran atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal peristiwa sebagai berikut :

- a). Nasabah tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada Bank sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam Pasal 5 dan atau Pasal 3 akad ini

- b). Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lain atau barang-barang yang dijadikan jaminan dan atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada Pasal 10 akad ini ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan atau nasabah melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan dalam Pasal 9 dan atau Pasal 12 akad tersebut
- c). Sebagian atau seluruh harta kekayaan nasabah disita oleh Pengadilan atau pihak yang berwajib ;
- d). Nasabah berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh di bawah pengampuan, dalam keadaan insolvensi, dinyatakan pailit, atau dilikuidasi .

12). Menerangkan Kriteria Pelanggaran Nasabah

Pada klausula akad ini, ditentukan beberapa kriteria bahwa nasabah dianggap telah melanggar syarat-syarat akad, apabila nasabah melakukan salah satu dari perbuatan atau lebih sebagai berikut :

- a). Menggunakan pembiayaan yang diberikan Bank di luar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank.
- b). Melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan atau akuisisi dengan pihak lain .
- c). Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan Bank.
- d). Melakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
- e). Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak Bank .

- f). Menolak atau menghalang-halangi Bank dalam melakukan pengawasan dan atau pemeriksaan.

13). Menerangkan Tentang Pengawasan dan Pemeriksaan

Atas kesepakatan kedua belah pihak, Bank atau kuasanya dapat untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang mendapat fasilitas pembiayaan dari Bank berdasarkan isi akad, serta hal lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan termasuk dan tidak terbatas pada membuat photo copynya.

14). Menerangkan tentang Asuransi

Terhadap seluruh barang yang menjadi jaminan atas pembiayaan berdasarkan akad ini, nasabah wajib menutup asuransi berdasarkan syariah atas bebannya pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Bank, dan nasabah menunjuk Bank sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut .

15). Menerangkan penyelesaian sengketa

Ada tiga pilihan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Pekanbaru dalam menyelesaikan sengketa dengan nasabah/mudharib, yaitu :

- a). Dengan jalan musyawarah atau mufakat.

- b). Dengan jalan memperoleh keadilan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
- c). Dengan jalan penyelesaian sengketa melalui lembaga Peradilan.

Apabila tidak tercapainya kata mufakat melalui jalan musyawarah dan sesudah menempuh jalan BASYARNAS, pihak Bank Muamalat Pekanbaru sebelum berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, masih mempergunakan Peradilan Umum sebagai jalan terakhir untuk memutuskan sengketa syariah di antara mereka, akan tetapi setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, terdapat ketentuan bahwa sengketa yang menyangkut ekonomi syariah menjadi kewenangan Peradilan Agama. Untuk itu dalam klausula tentang pilihan dalam menyelesaikan sengketa yang memuat peradilan Negeri atau Peradilan Niaga seharusnya diubah menjadi Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. Sesuai dengan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang telah menegaskan bahwa Peradilan Agama mempunyai

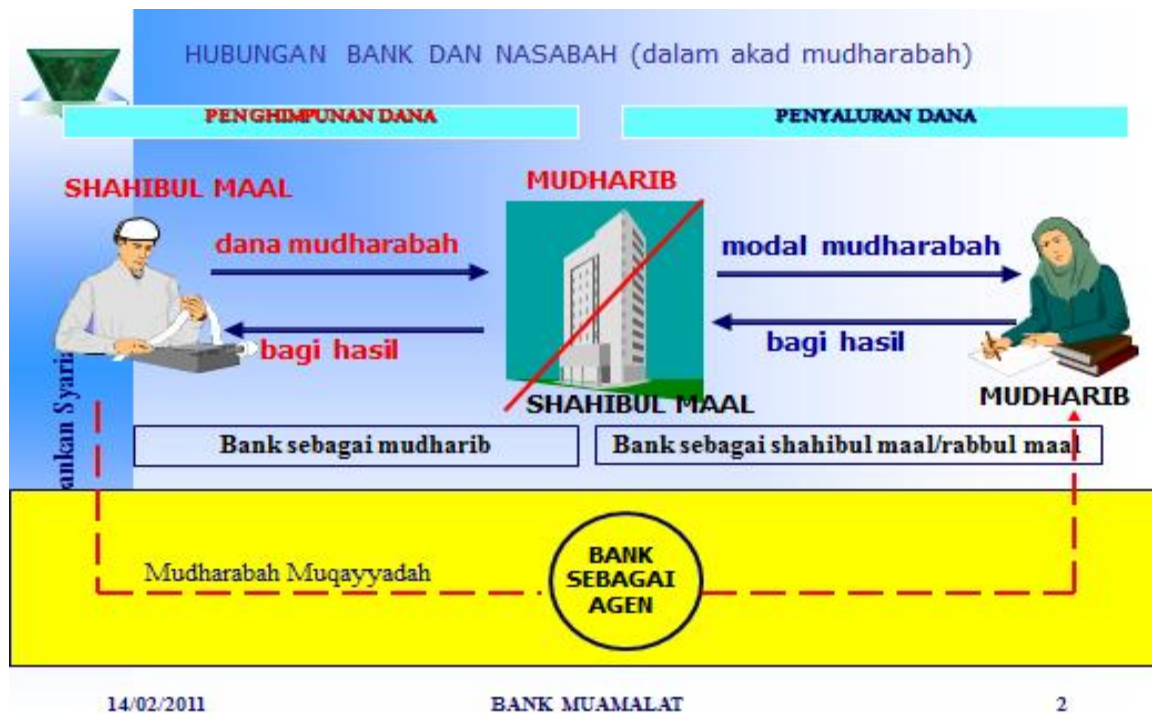
wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah yang termasuk di dalamnya bank syariah.

Jika wewenang untuk menangani perselisihan dan sengketa syariah di selesaikan di Peradilan Umum yang landasan memeriksa dan mengadili sengketa bukan dengan landasan hukum syariah, jelas menimbulkan permasalahan hukum yang cukup rumit, dimana penyelesaian sengketa melalui peradilan umum akan bertentangan dengan hukum syariah, sebab Peradilan Negeri atau Peradilan Niaga sebagai lembaga peradilan konvensional tidak mungkin mengadili suatu perkara dengan landasan hukum syariah, maka sangat aneh jika masalah sengketa syariah di selesaikan secara konvensional bukan dengan lembaga peradilan yang berlandaskan syariah.⁸⁵

J. Mekanisme Sistem Bagi Hasil (Mudharabah) antara Nasabah/Mudharib dan Bank Muamalat Cabang Pekanbaru

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan mudharabah.

⁸⁵ <http://agustianto.nirlah.com/2008/04/03/peradilan-agama-dan-sengketa-ekonomi-syariah>, di akses pada tanggal 9 bulan Juli 2010



Mekanisme Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Pekanbaru

1. Prinsip Wadiah

Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yad dhomanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah dhamanah berbeda dengan wadiah amanah. Dalam wadiah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam wadiah yad dhamanah, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Karena wadiah yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati dengan yad dhamanah, maka implikasi hukumnya sama dengan qordh, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, bank bertindak sebagai yang dipinjami. Jadi mirip seperti apa yang dilakukan oleh zubair bin awwam ketika menerima titipan uang dizaman Rosulullah SAW.

Ketentuan umum dari produk ini:

1. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan dimuka.
2. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet dan debit card.
3. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar benar terjadi
4. Ketentuan lain yang berkenaan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Prinsip Mudharah

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudhorib (pengelola). Dana tersebut digunakan untuk melakukan pembiayaan mudharabah. Hasil usaha ini akan dibagi

berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakan untuk melakukan pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.

Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan kartu tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.

Deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diberlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad dicantumkan perpanjangan secara otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

Jika seseorang datang kepada bank syariah dan ingin memperoleh dana untuk usahanya, maka bank syariah dan nasabah/mudharib tersebut dapat menyepakati kerja sama yang saling menguntungkan, seumpama seorang pedagang yang memerlukan modal untuk berbisnis, ia dapat mengajukan permohonan pembiayaan bagi hasil mudharabah dengan cara membuat rencana bisnis (*bussines Planing*) seperti menghitung perkiraan pendapatan yang akan diperoleh dari usahanya tersebut.

Bagi Bank Muamalat Cabang Pekanbaru yang menerapkan konsep bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah, dengan melihat kepada tujuan dari pembiayaan yang diminta oleh nasabah/mudharib, artinya penerapan bagi hasil atau keuntungan yang akan diperoleh sangat bervariasi tergantung kepada kesepakatan antara nasabah/mudharib dengan Bank Muamalat Cabang Pekanbaru tersebut.

Nisbah bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah merupakan faktor penting bagi Bank maupun nasabah/mudharib, oleh karena itu, perlu diketahui pokok-pokok perhitungan mudharabah, yaitu:

1. Jika diperhitungkan adalah hasil netto, ditentukan nisbah bagi hasil masing-masing, kemudian baru direncanakan tentang pembayaran kembali modal mudharabah.

Contoh :

Mudharabah ternak qurban sebesar Rp. 20.000.000,- pada 1 Zulkaidah dengan nisbah 60 : 40 (Bank : nasabah). Rencana pengembalian modal sekaligus tanggal 1 Muharram. Ternyata aktualisasi hasil yang ada diperhitungkan sebesar Rp.2.000.000,- Perhitungannya: Nisbah 60 : 40 Aktualisasi hasil Rp. 1.200.000,-. Keuntungan nasabah Rp. 800.000,- maka Pembayaran ke Bank tanggal 1 Muharram = Rp. 20.800.000,-

2. Jika yang diperhitungkan hasil, maka untuk mengetahui hasil yang diterima oleh Bank maupun nasabah, maka digunakan rumus sebagai berikut : S (setoran nasabah ke Bank Syariah) = P Profit (keuntungan yang diperhitungkan) dalam setoran ke Bank. Profit (keuntungan yang diperhitungkan) dalam setoran ke Bank + A (Angsuran atau cicilan pokok modal Mudharabah). Untuk menghitung hasil akhir dari permintaan, bahwa jika yang diperhitungkan adalah hasil dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara, yaitu :

a. Dengan sistem rata-rata

b. Dengan sistem efektif.

BAB III

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH YANG BERMASALAH DI BANK MUAMALAT CABANG PEKANBARU

A. Permasalahan Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Cabang Pekanbaru

Pada dasarnya pelaksanaan bagi hasil mudharabah antara nasabah/mudharib dengan Bank Muamalat Cabang Pekanbaru berjalan sesuai dengan Akad yang diperbuat oleh kedua belah pihak sehingga penerapan bagi hasil atau nisbah keuntungan di antara keduanya tetap terlaksana sebagaimana yang telah di muat dalam perjanjian tersebut.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan permasalahan pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Pekanbaru khususnya untuk pembiayaan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu :

1. Adanya Penyimpangan oleh Pengurus Koperasi terhadap dana dari Bank.
2. Adanya keterlambatan atau tak membayar angsuran oleh Anggota Koperasi
(Pegawai Negeri Sipil) karena berbagai sebab.
3. Adanya Faktor Eksternal (Faktor luar seperti contoh masuknya Bank Riau dalam memberikan pembiayaan langsung kepada nasabah), dimana Bank tersebut tidak

berkoordinasi kepada Bendahara Gaji dan Kepala Dinas/Kepala Sekolah dimana guru tersebut berdomisili.

4. Jauhnya dari Pengawasan /Kontrol Bank Muamalat Pekanbaru kepada Nasabah.

Dari permasalahan mudharabah , yang mendominasi adalah pengembalian dana bank yang diberikan kepada Koperasi sebagai contoh di daerah Indragiri Hulu (Inhu)- Riau dengan nama KPRI Min Ikhtiarun Nafiah. Namun sampai sekarang Jaminan Berupa Sertifikat(SHM) atas nama Pengurus yang bermasalah tersebut telah dikuasai Bank Muamalat Pekanbaru yang sebelumnya hanya menguasai jaminan berupa SK PNS saja.

B. Penanganan Pembiayaan Mudharabah Yang Bermasalah

Bank Muamalat Cabang Pekanbaru , sebagaimana bank lain juga tetap menjalankan standar penerapan kolektibilitas bank diluar yang lancar, yakni :

1. Dalam perhatian khusus;
2. Kurang lancar ;
3. Diragukan;
4. Macet.

Keterangan dan penjelasan pedoman pelaksanaan penanganan masalah :

1. Kriteria dalam batas waktu 1 hari s/d 30 hari tergolong pembiayaan Lancar, dilakukan dengan cara:
 - a. Pemantauan usaha nasabah;
 - b. Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan.

2. Kriteria dalam batas waktu di atas 30 hari s/d 90 hari (3 bulan) dan (2) dua kali tidak mengangsur maka akan dilakukan ;
 - a. Pemantauan usaha nasabah ;
 - b. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah ;
 - c. Penagihan dengan pendekatan ukhuwah.

3. Pembiayaan potensial bermasalah, dilakukan dengan cara :
 - a. Pembinaan anggota ;
 - b. Pemberitahuan dengan surat teguran ;
 - c. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah ;
 - d. Upaya preventif dengan penanganan *rescheduling*, yaitu :

Penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

4. Kriteria pembiayaan kurang lancar batas waktunya antara 90 hari s/d 180 hari dilakukan, dengan cara :
 - a. Membuat surat teguran atau peringatan;
 - b. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah secara lebih sungguh-sungguh.

- c. Upaya penyehatan dengan cara *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
5. Pembiayaan diragukan dalam batas waktu antara 180 hari s/d 270 hari atau macet dalam batas waktu antara 270 hari sampai lebih, dilakukan dengan cara :
- a. Dilakukan *resheduling*, yaitu menjadwalkan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.
 - b. Dilakukan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
 - c. Pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan Al-Qardhul Hasan.

Pembiayaan yang telah di restrukturisasi tetap digolongkan sebagai pembiayaan bermasalah, sampai nasabah benar-benar mampu memenuhi kewajibannya tepat waktu hingga tiga (3) kali pembayaran kewajiban setelah kolektibilitas digolongkan lancar.

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah ada beberapa prinsip, yaitu antara lain :

- a. Tertundanya pembayaran kewajiban nasabah meliputi margin/ bagi hasil, hutang pokok dan kewajiban lainnya.
- b. Adanya permintaan keringanan-keringanan dalam pengembalian pembiayaan misalnya penjadwalan kembali penurunan margin/ bagi hasil, atau keringanan lain.
- c. Penurunan kinerja nasabah yang tercermin dari penurunan aktivitas keuangan nasabah
- d. Prospek usaha nasabah mulai jenuh

- e. Terdapat penundaan penyelesaian proyek yang cukup lama dan/ atau pelampauan anggaran proyek yang cukup besar.
- f. Terdapat pelanggaran syarat-syarat pembiayaan yang memiliki bobot yang cukup materiil dan dapat merugikan Bank Muamalat Pekanbaru.
- g. Kualitas pembiayaan menurun.
- h. Adanya peraturan pemerintah yang berpengaruh negatif terhadap prospek usaha nasabah, keadaan memaksa (*force majeure*), dan kondisi lainnya yang dapat berakibat buruk terhadap usaha nasabah.

Penyelamatan pembiayaan bermasalah yang masih memiliki prospek usaha dilakukan melalui restrukturisasi dengan mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/12/UPPB tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Pembiayaan, yakni melalui :

Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah¹

Yakni pemberian keringanan kepada nasabah untuk membayar bagi hasil di bawah bagi hasil yang telah disepakati sesuai dengan kemampuan nasabah atas dasar proyeksi *cash flow* yang dihitung secara realistis. Langkah yang dapat ditempuh:

- a. Penurunan imbalan/ bagi hasil .

Dengan menggunakan asumsi-asumsi yang wajar. Keringanan berupa selisih antara bagi hasil baru dengan bagi hasil awal tersebut dapat bersifat pembebasan dan/ atau

¹ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/12/UPPB tanggal 12 November 1998

penangguhan yang akan diperhitungkan/ dibebankan apabila *cash flow* nasabah telah memungkinkan untuk dibebani.

b. Pengurangan tunggakan imbalan/ bagi hasil .

Yakni berupa pemberian keringanan kepada nasabah berupa pengurangan tunggakan bagi hasil, baik sebagian atau seluruhnya dan pengurangan tersebut dapat bersifat pembebasan dan/ atau penangguhan yang akan diperhitungkan/ dibebankan apabila *cash flow* nasabah telah dimungkinkan untuk dibebani.

c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan .

Yakni pemberian keringanan kepada nasabah berupa pengurangan tunggakan pokok pembiayaan dan pengurangan tersebut dapat bersifat pembebasan dan/ atau penangguhan yang akan diperhitungkan/ dibebankan apabila *cash flow* nasabah telah dimungkinkan untuk dibebani.

d. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan, penyesuaian jadual pelunasan pokok pembiayaan

Yakni pemberian keringanan kepada nasabah berupa perpanjangan jangka waktu pembiayaan serta penyesuaian jadual pelunasan pokok pembiayaan yang meliputi periode pelunasan dan jumlah angsuran pokok pembiayaan sesuai dengan kemampuan *cash flow* nasabah.

e. Penambahan fasilitas pembiayaan .

Untuk membantu nasabah dalam memulihkan kembali aktivitas usahanya, kepada nasabah dapat diberikan tambahan fasilitas pembiayaan baru dengan ketentuan pemberian pembiayaan baru tersebut harus memenuhi ketentuan pemberian pembiayaan secara normal antara lain nisbah bagi hasil normal dan kepada nasabah diupayakan. untuk menyerahkan jaminan tambahan yang cukup.

f. Pengambil-alihan asset nasabah untuk pelunasan pokok pembiayaan.

Yakni dilakukan dengan cara mengambil-alih sebagian atau seluruh asset nasabah untuk melunasi sebagian atau seluruh kewajibannya. Pengambil-alihan asset tersebut harus diperhitungkan sesuai dengan nilai pasar yang wajar.

g. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada usaha nasabah.

Yakni dilakukan dengan cara mengkonversi pembiayaan yang dinikmati nasabah menjadi penyertaan modal Bank pada perusahaan nasabah dengan batas waktu tertentu. Disamping cara di atas Restrukturisasi Pembiayaan juga dapat dilakukan dengan penyertaan modal Bank pada perusahaan nasabah.

Langkah-langkah lain yang dapat dilakukan Bank adalah menganjurkan nasabah melakukan :

- a. *Merger*, yaitu penyatuan manajemen, modal, pemasaran dan lain-lain dengan perusahaan sejenis yang masih berjalan dengan Bank.

- b. *Join venture*, yaitu berkongsi dengan perusahaan lain, memperbaiki kekurangan dan/ atau kelemahan administrasi pemasaran, pelayanan (*services*), kuantitas dan kualitas produk, kedisiplinan dan lainnya.
- c. *Take Over*, yaitu mengambil alih manajemen perusahaan nasabah dengan mempercayakannya kepada tim atau perusahaan baru yang dibentuk Bank bersama nasabah.

Adapun yang berwenang dan bertanggung-jawab dalam penanganan pembiayaan bermasalah adalah :²

1. Penanganan pembiayaan bermasalah menjadi tanggung-jawab seluruh jajaran Unit/ Divisi yang terkait dengan pembiayaan.
2. Penanganan pembiayaan yang kolektibilitasnya menunjukkan Lancar, Dalam Perhatian Khusus dan Kurang Lancar dilakukan oleh Marketing Pembiayaan . Sedangkan yang kolektibilitasnya menunjukkan Diragukan dan Macet ditangani oleh Unit Kerja Penyelesaian pembiayaan Bermasalah (Remedial). Dikecualikan untuk pembiayaan bermasalah yang masih dalam proses restrukturisasi, walaupun kolektibilitasnya menunjukkan Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet penanganannya dilakukan oleh pejabat/ Tim Restrukturisasi Pembiayaan.
3. Pembiayaan yang kolektibilitasnya telah menunjukkan diragukan atau macet harus segera dialihkan penanganannya ke Unit Kerja Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, kecuali

² Wawancara dengan Bapak Faisal bagian legal di Bank Muamalat Cabang Pekanbaru, pada tanggal 11 Januari 2011

apabila pembiayaan tersebut masih dalam proses restrukturisasi oleh Tim Restrukturisasi pembiayaan.

C. Penyelesaian Sengketa Di Bank Muamalat Cabang Pekanbaru

Dalam hukum perikatan Islam penyelesaian sengketa pada prinsipnya boleh dilaksanakan dengan tiga jalan, yaitu:

1. Dengan jalan perdamaian (*sulhu*)

Dalam fiqh Islam pengertian penyelesaian sengketa dengan jalan perdamaian *sulhu* adalah akad untuk menyelesaikan suatu masalah atau perselisihan sehingga menjadi perdamaian.³

Suatu jenis akad itu mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan atau untuk mengakhiri sengketa.⁴

2. Apabila sebelumnya orang yang berutang telah menerima pernyataan Ibra' dari pemberi utang.

Ketika nasabah/mudharib mengalami perselisihan dengan pihak bank syariah maka pihak nasabah/mudharib dan bank dapat melakukan perdamaian (*sulhu*) tanpa menyelesaikan masalah melalui jalur hukum. Ada beberapa cara yang ditawarkan fiqh Islam dalam penyelesaian secara *sulhu*, yaitu :

³ Hasballah Thaib, *Op Cit*, hlm. 146

⁴ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, *Op Cit*, hlm. 80

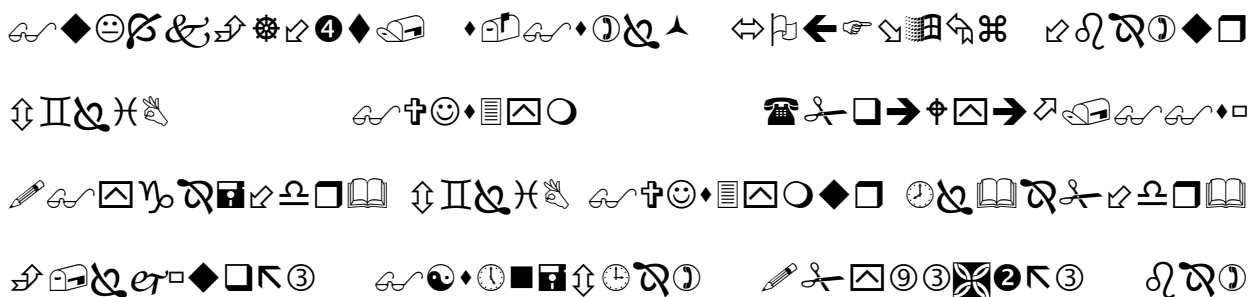
Dengan Ibra' yaitu dengan cara membebaskan atau melepaskan atau menghilangkan utang seorang nasabah/mudharib oleh pihak bank syari'ah, menurut jumhur ulama ibra' diterima dalam keadaan sebagai berikut :

1. Apabila Ibra' tersebut diberlakukan dalam masalah pengalihan hutang.
2. Apabila orang yang berutang meminta utangnya di gugurkan, lalu di kabulkan oleh pihak yang memberi utang.⁵

3. Dengan Arbitrase (*Tahkim*)

yaitu Penyelesaian sengketa dengan jalan tahkim adalah suatu penyelesaian dengan cara penunjukan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.⁶

Sumber Hukumnya pada QS: An Nisa ayat (35) menyatakan :



⁵ Hasballah Thaib, *Op Cit*, hlm. 147

⁶ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Op Cit*, hlm. 69



35. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam
 (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang
 hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.
 Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Juga dalam surah Al-Hujarat ayat (9) disebutkan sebagai berikut:⁷



9. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara
 keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian
 itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya

⁷ Ibid, hlm. 1972

menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Sampai saat ini PT. Bank Muamalat Cabang Pekanbaru , hanya menyelesaikan permasalahan Pembiayaan Bermasalah lewat jalur perdamaian (Sulhu) dan Ibra'. Sedangkan lewat jalan Arbitrase belum ada. Namun penulis tetap memaparkan jalan penyelesaian lewat Arbitrase dan Litigasi.

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah melalui Arbitrase dan Litigasi

Langkah-langkah Arbitrase dan Litigasi

A. Kriteria Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah melalui Arbitrase dan Litigasi

1. Langkah arbitrase dan litigasi dilaksanakan apabila langkah non arbitrase dan non litigasi baik yang dilakukan oleh Bank maupun Kantor Hukum tidak tercapai.
2. Pembiayaan telah jatuh tempo dan berkolektibilitas **Macet**. Apabila pembiayaan belum jatuh tempo dan belum berkolektibilitas Macet, Bank akan mencatat / mengadministrasikan terlebih dahulu menjadi pembiayaan yang telah jatuh tempo dan berkolektibilitas Macet dikarenakan nasabah ingkar janji (wanprestasi) sesuai klausula akad pembiayaan dan Regulasi Bank Indonesia yang terkait.

3. Pembiayaan bermasalah yang sisa kewajibannya minimal sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

B. Proses Penyelesaian Melalui Arbitrase

Menurut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Tentang Badan Arbitrase Syariah nasional Nomor: Kep-09/MUI/2003, Badan Arbitrase Syariah nasional (BASYARNAS) adalah lembaga hakam (arbitrase syariah) yang bertugas memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalat/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain.

Atas permintaan pihak-pihak dalam suatu perjanjian, BASYARNAS dapat memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

Dalam melaksanakan tugasnya BASYARNAS adalah bebas, otonom dan *independent* – tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dan pihak-pihak manapun.

Khusus keberadaan *BASYARNAS* terdapat dua pendapat yang berbeda, pertama menyatakan *BASYARNAS* bukan sebagai lembaga peradilan mengingat dalam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 48 tahun 2009 pasal 3, disebutkan bahwa di luar peradilan negara yang ada tidak diperkenankan lagi adanya

peradilan lain. Kedua, penyelesaian di luar pengadilan atas dasar perdamaian diperkenankan melalui wasit (*arbitrage*), karenanya *BASYARNAS* bukan termasuk proses Litigasi, sedangkan ketentuan pasal 615 hingga 651 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) yang masih berlaku bahwa arti ***Litigant*** sendiri adalah pihak yang berperkara, sedang apabila diajukan melalui *BASYARNAS* selaku lembaga Arbitrase atau perwasitan wajib dengan prosedur acara pengajuan yang berlaku di *BASYARNAS*.

A. Yang dapat diselesaikan melalui *BASYARNAS*

Kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada *BASYARNAS*, dilakukan oleh pihak:

- a. Dengan mencantumkan klausula arbitrase dalam suatu naskah perjanjian atau.
- b. Dengan perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat dan disetujui oleh para pihak, baik sebelum maupun sesudah timbul sengketa.

B. Tahapan Proses Penyelesaian pada *BASYARNAS*.

- a. Pendaftaran surat permohonan

Prosedur Arbitrase dimulai dengan mendaftarkan surat permohonan untuk mengadakan arbitrase di sekretariat *BASYARNAS*.

Surat Permohonan harus memuat sekurang-kurangnya:

- i. Nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak;
- ii. Menyebutkan adanya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase sebagaimana dimaksud huruf A di atas;
- iii. Masalah yang menjadi sengketa;
- iv. Tuntutan dan dasar tuntutan;

Surat permohonan harus disertai:

- i. Salinan/copy surat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, yaitu ketentuan bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut akan diselesaikan oleh BASYARNAS;
 - ii. Salinan/copy surat perjanjian arbitrase tersendiri yang secara khusus menyerahkan sengketa kepada BASYARNAS;
 - iii. Surat Kuasa Khusus apabila Surat Permohonan diajukan oleh Kuasa Pemohon;
- b. Acara Pemeriksaan.
- i. Seluruh pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup
 - ii. Bahasa yang digunakan dalam beracara adalah Bahasa Indonesia.
 - iii. Selama proses dan pada setiap tahap pemeriksaan berlangsung, Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis harus memberi perlakuan dan kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak untuk membela dan mempertahankan kepentingannya.

- iv. Baik atas pendapat sendiri maupun atas permintaan salah satu pihak, Arbiter tunggal atau Arbiter Majelis dapat melakukan pemeriksaan dengan mendengar keterangan saksi, termasuk saksi ahli.
 - v. Setiap bukti atau dokumen yang disampaikan salah satu pihak kepada Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis, copy/salinannya harus diberikan kepada pihak lawan sengketa.
 - vi. Tata cara pemeriksaan dilakukan secara langsung dan tertulis di depan persidangan yang ditetapkan untuk itu tanpa mengurangi kebolehan pemeriksaan dengan lisan.
 - vii. Pemeriksaan terdiri dari tahap: jawab menjawab, replik , duplik, pembuktian, kesimpulan dan putusan, yang pentahapannya ditentukan berdasarkan kebijaksanaan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis.
- c. Perdamaian.
- i. Sebelum pemeriksaan dimulai, Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis harus berusaha mendamaikan para pihak.
 - ii. Apabila usaha itu berhasil, maka Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan membuatkan Akte Perdamaian yang bersifat final dan mengikat para pihak, dan memerintahkan para pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut.
 - iii. Putusan perdamaian didaftarkan di Pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (4) Peraturan Prosedur BASYARNAS.

“Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan dibacakan, lembar asli atau salinan otentik putusan Arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri”.

- iv. Apabila perdamaian tidak berhasil, maka Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan meneruskan pemeriksaan terhadap sengketa yang dimohon.

d. Pembuktian dan saksi/ahli

- i. Para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti disertai daftar bukti dan penjelasannya.
- ii. Apabila dianggap perlu, Arbiter Tunggal atau Arbiter majelis, baik atas permintaan para pihak maupun atas prakarsanya sendiri, dapat memanggil saksi atau ahli untuk didengar keterangannya.
- iii. Pihak yang meminta dipanggilnya saksi atau ahli, harus membayar terlebih dahulu kepada Sekretariat BASYARNAS, segala biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau ahli yang bersangkutan.
- iv. Dalam hal pemanggilan saksi atau ahli dilakukan atas prakarsa Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis, maka biaya untuk itu akan dibebankan kepada para pihak secara adil, namun terlebih dahulu harus dibayar oleh Pemohon kepada Sekretariat BASYARNAS.

- v. Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis dapat meminta bantuan saksi atau ahli untuk memberikan keterangan tertulis mengenai suatu persoalan khusus yang berhubungan dengan pokok sengketa.
 - vi. Para pihak wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh saksi atau ahli.
 - vii. Arbiter Tunggal atau Arbiter majelis meneruskan salinan keterangan saksi atau ahli tersebut kepada para pihak agar dapat ditanggapi secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
 - viii. Apabila terdapat hal yang kurang jelas, atas permintaan pihak yang berkepentingan, saksi atau ahli yang bersangkutan dapat didengar keterangannya di muka sidang arbitrase dengan dihadiri oleh para pihak atau kuasanya.
 - ix. Sebelum memberikan keterangan di muka sidang, para saksi atau ahli wajib mengucapkan sumpah, bahwa saksi atau ahli hanya akan menerangkan apa yang mereka ketahui dengan sungguh-sungguh.
- e. Pencabutan Permohonan
- i. Selama sebelum dijatuhkan putusan, Pemohon dapat mencabut permohonannya.
 - ii. Apabila pencabutan permohonan itu dilakukan oleh Pemohon sebelum Ketua BASYARNAS menunjuk Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis dan panggilan untuk menghadap sidang belum

disampaikan, maka biaya pemeriksaan dikembalikan kepada Pemohon.

- iii. Apabila pencabutan permohonan itu dilakukan Pemohon sesudah ada jawaban dari Termohon sebagaimana dimaksud pasal 7 & ayat (3) Peraturan Prosedur BASYARNAS;

“Arbiter tunggal atau arbiter majelis memberitahukan kepada Termohon disertai perintah untuk menanggapi permohonan tersebut dan memberikan jawabannya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan”,

maka pencabutan tersebut hanya diperbolehkan dengan persetujuan Termohon.

- iv. Apabila pencabutan permohonan dilakukan oleh Pemohon setelah pemeriksaan dimulai, maka semua biaya yang telah dibayar oleh Pemohon tidak dikembalikan.

f. Berakhirnya pemeriksaan

- i. Apabila Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis menganggap pemeriksaan telah cukup, maka Arbiter Tunggal atau Arbiter majelis akan menutup pemeriksaan itu dan menetapkan suatu hari sidang guna membacakan putusan.
- ii. Tanpa mengurangi ketentuan ayat (i) di atas, apabila dianggap perlu Arbiter Tunggal atau arbiter majelis baik atas inisiatif sendiri

maupun atas permintaan salah satu pihak, dapat membuka sekali lagi pemeriksaan sebelum putusan dijatuhkan.

- iii. Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan membacakan keputusan dalam suatu sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak, dan apabila salah satu atau para pihak tidak hadir maka putusan akan tetap dibacakan, sepanjang kepada para pihak telah disampaikan panggilan secara patut.
- iv. Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat *Bismillaahirrahmanirrahim*, diikuti dengan *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*.
- v. Seluruh proses pemeriksaan sampai dengan dibacakannya putusan oleh Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan diselesaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari, terhitung sejak Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis ditetapkan.
- vi. Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila:
 - a. Diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu;
 - b. Sebagai akibat ditetapkan putusan provisional atau putusan sela lainnya; atau
 - c. Dianggap perlu oleh Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis untuk kepentingan pemeriksaan.

g. Pengambilan putusan

- i. Putusan/penetapan Arbiter Majelis diambil berdasarkan musyawarah/mufakat, dan apabila mufakat tidak tercapai maka putusan/penetapan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- ii. Apabila suara terbanyak tidak tercapai, maka Ketua Arbiter Majelis dapat mengambil putusan oleh dia sendiri dan putusan tersebut dianggap diambil oleh semua Arbiter Majelis.

h. Perbaikan putusan

- i. Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak disampaikan, salah satu pihak boleh mengajukan secara tertulis permintaan perbaikan putusan tentang kesalahan yang berkenaan dengan jumlah perhitungan, salah ketik atau salah cetak. Permintaan diajukan ke Sekretariat BASYARNAS dan tembusannya disampaikan kepada pihak lawan.
- ii. Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (i) di atas, Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis yang memutus atas inisiatif sendiri dapat melakukan perbaikan putusan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan, hanya mengenai hal-hal yang tersebut dalam ayat (i).
- iii. Perbaikan putusan harus dibuat tertulis dan ditandatangani, dan paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak permintaan disampaikan oleh Sekretaris Arbiter Tunggal atau arbiter majelis

sudah memberikan perbaikan yang diminta dan perbaikan tersebut langsung menjadi bagian yang tidak terpisah dengan putusan.

i. Pembatalan putusan

Putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila dipenuhi alasan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

j. Pendaftaran putusan

Putusan BASYARNAS yang sudah ditandatangani oleh Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis bersifat Final dan Mengikat (*Final and Binding*) bagi para pihak yang bersengketa, dan harus diberikan kepada masing-masing Pemohon dan Termohon.

k. Pelaksanaan putusan.

Untuk tahap pelaksanaan putusan (eksekusi) dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri / Agama.

C. Adapun kelebihan dan kelemahan penyelesaian melalui BASYARNAS sebagai berikut:

1. Kelebihan penyelesaian arbitrase:

- a. Proses pengambilan putusan relatif cepat.
- b. Biaya yang dikeluarkan relatif murah.

c. Putusannya final dan mengikat (*Final and Binding*).

2. Kelemahan penyelesaian arbitrase:

- a. tidak mempunyai Fiat Eksekusi, sehingga untuk proses eksekusi harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri /Pengadilan Agama.
- b. Belum terdapat di sebagian besar daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota.

C. Proses Penyelesaian Melalui Litigasi

Bentuk pelaksanaannya dilakukan melalui proses lembaga peradilan dengan jalan :

- A. Pengajuan Gugatan Perdata
- B. Pelaporan Pidana
- C. Permohonan Eksekusi Agunan
- D. Permohonan Kepailitan

A. Pengajuan Gugatan Perdata

Pengajuan gugatan perdata dilakukan terhadap aset-aset nasabah yang bukan merupakan agunan dan bila nasabah sudah tidak ada harapan untuk penyelesaian secara sukarela (non litigasi).

Pelaksanaan gugatan perdata dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama tergantung yurisdiksi hukum yang telah disepakati. Pengajuan gugatan perdata di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dimulai dengan beberapa tahapan, dan bila keputusannya belum berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) dan masih dilakukan upaya hukum, dapat diteruskan sampai Mahkamah Agung, yang kesemuanya dilaksanakan menurut Hukum Acara Perdata.

Tahapan pengajuan gugatan:

- a. Penyusunan gugatan.
- b. Pendaftaran.
- c. Prosedur beracara di Pengadilan.
- d. Putusan.
- e. Upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali).
- f. Pelaksanaan putusan.

Yang perlu menjadikan perhatian dalam setiap akan mengajukan proses gugatan perdata adalah:

1. Pihak yang akan diajukan gugatan (tergugat), adalah nasabah dan atau penjamin ataupun pihak lainnya yang benar-benar tidak memiliki itikad baik dan tidak memiliki kemauan menyelesaikan permasalahannya secara sukarela.
2. Yurisdiksi hukum dan atau kewenangan Pengadilan yang ada pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.

3. Hal-hal yang akan diajukan dalam gugatan yang diinginkan (*Petitum*).

Inti yang diharapkan dalam gugatan adalah terkabulnya pengembalian piutang Bank, baik perolehan dari hasil :

- a. Pembayaran secara tunai, seketika dan sekaligus terhadap piutang yang ada.
- b. Penguasaan barang yang menjadi objek pembiayaan, atau
- c. Penguasaan barang atau harta kekayaan lainnya yang tidak diikat sebagai agunan, namun mungkin dimiliki oleh tergugat untuk selanjutnya dijual melalui lelang eksekusi dan hasilnya dipergunakan sebagai pelunasan hutang nasabah tersebut kepada Bank Muamalat.

Tujuan utama proses gugatan adalah untuk mendapatkan keputusan berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) dan mengikat yang mewajibkan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait dalam perkara gugatan.

Pada dasarnya peradilan perdata wajib diselenggarakan dengan tepat, cepat, dan murah, namun dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu cukup lama dan biaya yang tidak kecil, karenanya setiap langkah pengajuan gugatan ini perlu dicermati secara matang dan diperhitungkan untung ruginya.

Pelaksanaan pengajuan gugatan dapat dilakukan sendiri oleh aparat Bank Muamalat ataupun bekerja sama dengan Lembaga Bantuan atau Jasa

Hukum, yang sebelumnya wajib dengan persetujuan Komite Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.

4. Kelebihan Proses Gugatan :

- a. Dimungkinkan proses cepat, yaitu apabila pada saat gugatan diajukan dimintakan pula Keputusan yang sifatnya serta merta (*Uitvoerbar bij voorraad*).
- b. Dimungkinkan pemohon mengajukan sita jaminan atas barang kekayaan nasabah yang tidak dijaminkan.

5. Kelemahan Proses Gugatan :

- a. Proses gugatan perdata membutuhkan waktu cukup lama.
- b. Butuh biaya relatif cukup besar.

B. Pengajuan Pidana

Bentuk lain upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu melalui jalan pengaduan adanya tindak perbuatan yang patut disangkakan dilakukan nasabah atau pemilik agunan ataupun pihak lain (baik ekstern Bank ataupun intern Bank) dan patut diduga termasuk tindak pidana yang menimbulkan kerugian pada pihak Bank Muamalat.

Tujuan dilakukannya pengajuan perkara tindak pidana lebih mengutamakan **penyelesaian** kepada pihak yang dimaksudkan, dan selanjutnya mengembalikan

kekayaan yang diperoleh dari perbuatan yang melanggar dan pada akhirnya menyelesaikan kewajibannya.

Upaya tuntutan pidana ini dapat diajukan kepada pihak kepolisian, apabila berkaitan adanya *Tindakan Penggelapan, Penipuan, Pemalsuan* dan lain sebagainya.

Yang perlu menjadikan perhatian dalam setiap akan mengajukan proses pengajuan pidana adalah:

1. Kelebihan pengajuan pidana

Umumnya para pihak yang patut diduga atau disangka terlibat cenderung berharap ingin menyelesaikan perkara yang dihadapinya dengan jalan damai.

2. Kelemahan pengajuan pidana

- a. Kecenderungan membawa pengaruh terhadap nama baik (*Image*) Bank.
- b. Membutuhkan biaya yang relatif cukup besar.
- c. Apabila bukti permulaan yang diajukan kurang mendukung, maka akan terjadi sebaliknya yaitu nasabah balik menggugat /mengadukan pihak Bank.
- d. Apabila nasabah tetap bersikukuh, sehingga Bank tidak mendapatkan pembayaran kewajiban apapun.

Dalam pelaksanaannya pengajuan tindak pidana ini juga membutuhkan waktu cukup lama dan biaya yang tidak kecil, karenanya langkah pengajuan tindak pidana ini perlu dicermati secara matang dan sangat diperhitungkan untung ruginya.

Pelaksanaan proses pengajuan tindak pidana ini dapat dilakukan sendiri oleh Aparat Bank Muamalat ataupun bekerja sama dengan Lembaga Bantuan atau Jasa Hukum, yang wajib dengan persetujuan Komite Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.

C. Eksekusi Terhadap Agunan

Eksekusi Agunan adalah pengajuan permohonan eksekusi terhadap aset-aset nasabah yang merupakan agunan dan dibebani/diikat dengan Hak Tanggungan/Fidusia/Gadai/Hipotik/Bortoght yang memiliki kekuatan eksekutorial (Fiat Eksekusi).

Bank melakukan upaya penyelesaian melalui Eksekusi untuk Agunan berupa :

- a. Sertifikat Hak atas tanah yang telah diikat Akte Pembebanan Hak Tanggungan, yang memiliki dipersamakan dengan suatu keputusan Pengadilan (dalam sertifikat hak tanggungan) terdapat irah-irah **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**.

- b. Barang bergerak atau barang-barang lainnya yang telah mendapatkan Keputusan Pengadilan untuk dikuasai Bank dan dijual melalui pelelangan.

Tahapan eksekusi Hak Tanggungan:

- a. Penetapan Aanmaning.

Memberikan peringatan kepada Termohon eksekusi oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama untuk memenuhi kewajibannya dalam waktu 8 (delapan) hari sebanyak 2 (dua) kali peringatan.

- b. Penetapan Sita

Penetapan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama untuk meletakkan sita atas objek eksekusi dengan menghasilkan Berita Acara Sita.

- c. Penetapan Lelang

Penetapan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama untuk dilaksanakan lelang di muka umum.

- d. Pelaksanaan Lelang

Pengadilan akan memohon kepada Balai Lelang untuk melaksanakan pelelangan atas objek eksekusi yang terlebih dahulu telah ditetapkan harga limit.

- e. Pengosongan

Tahap ini dilakukan bila penghuni/pemilik agunan tidak bersedia mengosongkan secara sukarela melalui pihak pengadilan dengan meminta bantuan pihak Kepolisian.

Yang perlu menjadikan perhatian dalam setiap akan mengajukan proses pengajuan pidana adalah:

1. Kelebihan Eksekusi Hak Tanggungan

- a. Penguasaan barang yang menjadi objek agunan, umumnya dapat dilaksanakan dengan waktu cepat.
- b. Pada tahapan Aanmaning nasabah atau pemilik agunan cenderung berupaya menyelesaikan kewajibannya.
- c. Proses pelaksanaan eksekusi dapat diikuti dengan mudah karena prosedur pelaksanaannya telah baku.

2. Kelemahan Eksekusi Hak Tanggungan

- a. Butuh biaya relatif cukup besar.
- b. Penjualan lelang agunan bila tidak dilaksanakan dengan baik bersama pihak yang berwenang, barang lelang dapat terjual dengan nilai yang tidak diharapkan Bank sebagai pelunasan kewajibannya.

Dalam pelaksanaan permohonan eksekusi wajib memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Waktu pelaksanaan proses permohonan eksekusi harus dilakukan dengan memperkirakan target, karenanya langkah pengajuan eksekusi ini perlu dicermati secara matang dan perlu pertimbangan yang matang pula.

Pelaksanaan pengajuan permohonan eksekusi ini dapat dilakukan sendiri oleh pejabat Bank Muamalat ataupun bekerja sama dengan Lembaga Bantuan atau Jasa Hukum, dengan persetujuan Komite Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.

D. Permohonan Kepailitan

Upaya lain di luar proses litigasi tersebut di atas, oleh undang-undang diberikan peluang dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah secara cepat, terbuka dan efektif, yaitu melalui proses pengajuan kepailitan sebagaimana telah diatur di dalam undang-undang kepailitan Nomor 37 tahun 2004.

Tahapan permohonan kepailitan:

- a. Pengajuan permohonan
- b. Pembuktian/proses beracara
- c. Putusan
 - i. Diputuskan pailit
 - ii. Penentuan Hakim Pengawas
 - iii. Penentuan Kurator
- d. Pelaksanaan Putusan Kepailitan

Pelaksanaan Putusan Kepailitan dilakukan oleh kurator yang ditunjuk.

Untuk pelaksanaan pengajuan kepailitan ini perlu diteliti secara matang dan sangat perlu pertimbangan yang lengkap. Pelaksanaan pengajuan permohonan pailit ini hanya dapat dilakukan secara bekerja sama dengan

Lembaga Bantuan atau Jasa Hukum (advokat), dengan persetujuan Komite Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.

D. Proses Pengajuan Usulan

I. Inventarisasi Data dan Fakta

Menginventarisasi data dan fakta untuk penyusunan materi usulan :

1. Data fasilitas yang tercantum pada Persetujuan Prinsip Pembiayaan (*Offering Letter*).
2. Data identitas nasabah (KTP, Akte Pendirian/Perubahan, Izin-izin, dll)
3. Data pembiayaan saat usulan dibuat seperti; pokok, tunggakan pokok/margin/sewa, kolektibilitas.
4. Akad Pembiayaan, Sertifikat Agunan (SHT, Fidusia, Hipotik, Gadai), Bukti Kepemilikan (SHM, SHGB, BPKB, Groose Akte, dll).
5. Surat Kuasa Debet rekening, Surat Sanggup, SPRP, TTUN, STTB, Mutasi Rekening.
6. Surat Peringatan I, II dan III.
7. Fakta/Informasi latar belakang penyebab pembiayaan menjadi bermasalah beserta upaya-upaya yang telah dilakukan dan hasilnya. Informasi ini terangkum dalam “Permasalahan, Tindak Lanjut dan Pencapaian pada usulan penyelesaian pembiayaan”. Untuk memperkuat deskripsi penyebab pembiayaan bermasalah dapat disertakan analisa aspek keuangan, manajemen (untuk pembiayaan usaha/proyek), karakter dan lainnya yang dianggap perlu.
8. Informasi analisa penyelesaian melalui Litigasi.

9. Penjabaran/penyajian data dan informasi pada usulan memperhatikan unsur-unsur keringkasan, relevansi dan informatif.
10. Memintakan Legal opini kepada USP terhadap penyelesaian Arbitrase atau Litigasi yang akan dilakukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Bank akan memenangkan proses Arbitrase atau Litigasi.

Legal opini yang dimintakan berisikan:

1. Para pihak.
2. Legalitas para pihak.
3. Keabsahan dokumen perjanjian pembiayaan.
4. Keabsahan dokumen agunan dan perikatannya.

II. Struktur Usulan

Dalam pengajuan usulan ke Komite Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, hal-hal yang harus dilengkapi dan tersusun adalah:

Alinea Pembuka

I. Tujuan

Memaparkan tujuan dan maksud pengajuan usulan penyelesaian melalui mekanisme litigasi terhadap nasabah.

II. Latar Belakang Nasabah

- Data Nasabah

- Data Pembiayaan
- Data Agunan

III. Kronologi Pembiayaan

Menggambarkan seluruh fasilitas pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah termasuk grup terkait.

IV. Permasalahan

Memaparkan masalah yang menjadi penyebab pembiayaan tersebut menjadi bermasalah, antara lain; manajemen usaha, *cash flow*, pemasaran, produksi, tenaga kerja, PHK, nasabah tidak diketahui keberadaannya (agunan milik pihak III), piutang tidak tertagih, proyeksi bagi hasil yang tidak dapat terealisasi, hal-hal yang bersifat administratif dan lain-lain.

V. Upaya yang Telah Dilakukan dan Pencapaian Hasil

Menggambarkan upaya apa saja yang telah ditempuh oleh Account Manager Pembiayaan dan/atau Remedial dalam menangani permasalahan yang tersebut di atas, termasuk pencapaian hasil/realisasi dari upaya yang disebutkan.

Pada bagian ini juga dijelaskan bahwa Account Manager Remedial telah menawarkan solusi dan upaya lain-lain non litigasi kepada nasabah, hanya saja nasabah menolak solusi tersebut.

VI. Rencana Tindak Lanjut

Memaparkan rencana penyelesaian melalui proses litigasi apa yang akan ditempuh dan selanjutnya dimintakan persetujuan Komite Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada bagian rekomendasi.

Bagian ini dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang akan memperkuat pelaksanaan rencana tindak lanjut tersebut, antara lain:

- i. Kepastian hukum penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- ii. Kepastian penyelesaian masalah.
- iii. Pertimbangan lainnya yang dianggap perlu dipaparkan.

VII. Mekanisme Litigasi

a. Legal Opini

Menyajikan pendapat hukum tentang kekuatan dan kelemahan hukum posisi Bank dan usulan alternatif upaya hukum yang mungkin dilakukan untuk penyelesaian permasalahan. Opini ini dapat bersumber dari bagian hukum/Legal Support Bank atau Kantor Hukum yang akan dikuasakan.

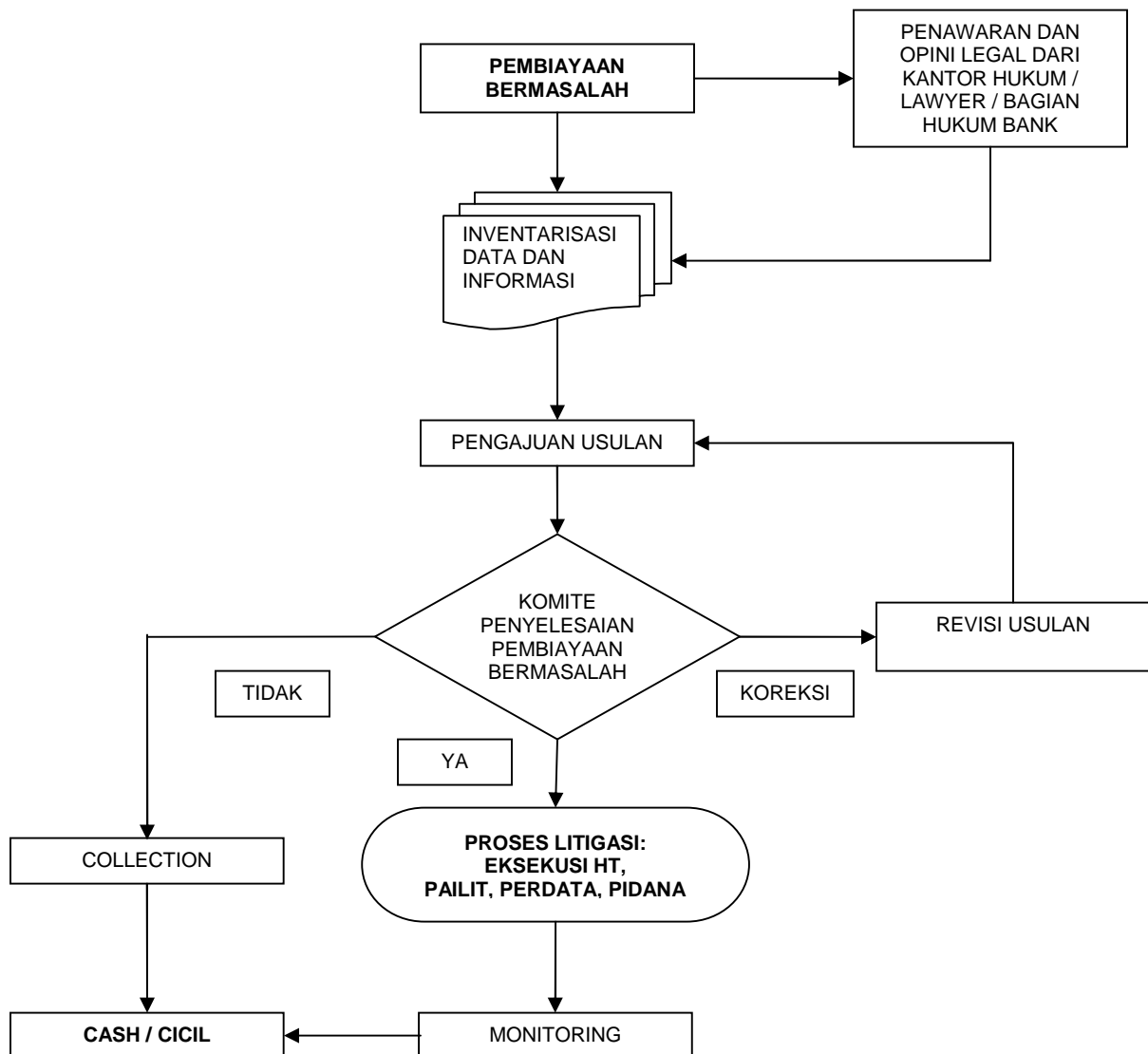
b. Biaya-biaya

- i. Biaya-biaya operasional
- ii. Biaya *Success Fee*

c. Penunjukkan Jasa Hukum

Menyampaikan latar belakang dan pengalaman Kantor Hukum (*Law Firm*) yang akan memberikan jasa hukum kepada Bank. Bila disetujui

bekerja sama dengan Kantor Hukum yang diusulkan maka dapat membuat Surat Kuasa Substitusi dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Branch/Business Manager dan Kuasa Direksi.



Skema Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Arbitrase dan Litigasi

Maka ketika para pelaku ekonomi syariah dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan syariah dengan serta merta akan melangsungkan hubungan kemitraan dengan sistem syariah pula, dan bilamana hubungan tersebut terjadi atau berakhir dengan sebuah kecederaan perilaku salah satu pihak dalam istilah lain perselisihan maka kedua belah pihak bisa memusyawarakannya terlebih dahulu sebagaimana yang disebutkan di atas, dan jika hal tersebut juga tidak tercapai kesepakatan maka kedua belah pihak dapat menunjuk seseorang atau lembaga yang diyakini mampu untuk adil dalam menyelesaikan perkara mereka.

Pelaku bisnis juga manusia biasa yang tidak terlepas dengan masalah, maka masalah yang bisa berawal dari diri mereka sendiri atau bisa juga berawal dari pihak rekan atau mitra bisnis mereka, untuk itu kedua belah pihak membutuhkan solusi agar ketenangan hidup yang didambakan oleh setiap manusia dalam bermasyarakat dapat terwujud.⁸

- 1). Membuat suatu perjanjian tersendiri yang khusus menyatakan keinginan para pihak tersebut untuk menyerahkan masalahnya diadili secara arbitrase, perjanjian khusus ini ada di buat setelah perjanjian pokok disebut sebagai akta kompromis. Supaya masalah yang terjadi tidak di adili oleh pengadilan, para pihak yang mempunyai perkara dalam keterikatan perjanjian bila mereka menginginkan dapat diadili secara *tahkim* dalam istilah sekarang dengan jalan Arbitrase. Mencantumkan dalam perjanjian pokoknya suatu bagian atau klausula yang

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Op Cit, hlm. 143

berisi tentang keinginan para pihak untuk menyerahkan masalah yang timbul dan perjanjian tersebut diselesaikan secara arbitrase.⁹

Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam akad atau jika terjadi perselisihan di antara bank dan nasabah maka penyelesaian dilakukan dengan musyawarah, dalam musyawarah dimaksud Di Indonesia peluang dan jalan terhadap penyelesaian sengketa syariah selain di pengadilan yaitu di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), dengan syarat bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan masalah mereka di BASYARNAS tersebut, tapi jika salah satu pihak tidak setuju maka persolaan atau sengketa tersebut tidak bisa dengan jalan Arbitrase yang dimaksud. BASYARNAS adalah lembaga permanen yang didirikan oleh MUI Indonesia yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalah yang timbul dalam perdagangan, industri, keuangan, untuk itu lembaga ini harus menampilkan kemampuan dalam menyelesaikan persengketaan secara baik dan memuaskan. Dalam PBI/7/46/2005 juga terkait dengan penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah, hal itu diatur dalam ketentuan Bab II Pasal 20 tentang penyelesaian sengketa bank dengan nasabah, yaitu:

tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian lebih lanjut dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau badan arbitrase syariah.¹⁰

- 2). Prosesnya cepat apabila dibandingkan dengan lembaga peradilan, karena umumnya merupakan keputusan yang sudah final dan mengikat dan menurut Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase menyebutkan: penyelesaian

⁹ Hasballah Thaib, *Op cit*, hlm. 148

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Op Cit*, hlm. 153

sengketa harus sudah diselesaikan dalam waktu 180 hari sejak arbiter atau majelis arbiter terbentuk. Dengan demikian penyelesaian sengketa dengan jalan arbitrase boleh dilakukan oleh para pihak yang berselisih, karena selain penyelesaiannya relatif cepat, kerahasiaan para pihak yang bersengketa tetap terjaga mengingat sidang arbitrase adalah tertutup untuk umum. Mengenai manfaat dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah Hakim (partikular) adalah pilihan para pihak dan sudah merupakan orang yang ahli dalam masalahnya.¹¹

3.) Putusan arbitrase ini dapat dilaksanakan (eksekusi) di luar negeri.¹²

Namun jika para pihak tidak menyebutkan di dalam perjanjian atau akad mereka bahwa BASYARNAS adalah tempat penyelesaian sengketa bila terjadi, maka secara singkat dapat dikatakan bahwa lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa di bidang perekonomian syariah adalah Pengadilan Agama berdasarkan

Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Peradilan Agama, dimana dalam ketentuan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

¹¹ Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase

¹² Hasballah Thaib, *Op Cit*, hlm.150

Berdasarkan isi pasal tersebut di atas, telah dengan tegas menyebutkan bahwa perkara ekonomi syariah menjadi wewenang Peradilan Agama untuk menyelesaikannya. Maksud ekonomi syariah disini adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi dari bank syariah.¹³

Ekonomi syariah dapat dilihat dalam dua disiplin ilmu yaitu ilmu ekonomi Islam dan ilmu hukum ekonomi Islam. Dengan demikian alasan disiplin ilmu ini merupakan salah satu alasan bahwa sengketa ekonomi syariah dalam pasal 49 huruf (i) menjadi wewenang lembaga Peradilan Agama. Kemudian karena berhubungan dengan ilmu hukum ekonomi maka para hakim di lingkungan Peradilan Agama harus lebih memperdalam pengetahuannya tentang hukum ekonomi syariah lebih lanjut.¹⁴

Selain alasan tersebut di atas, alasan lain yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani sengketa di bank Syariah. Hal ini dapat di analisa bahwa orang-orang yang berada di lingkungan Peradilan Umum, bukan ahlinya di bidang syariah. Kemudian para hakimnya pun tidak berlatar belakang pendidikan syariah. Oleh sebab itu sudah tepat bila terjadi gugatan syariah di serahkan ke Pengadilan Agama yang pada umumnya para hakimnya mempunyai latar belakang pendidikan syariah.

Dengan terjadinya hal seperti ini tentu dengan sendirinya akan meresahkan masyarakat terutama bagi dunia bisnis, sebab bagi pelaku bisnis penyelesaian yang menimbulkan

¹³ <http://pa-pangkalpinang.pta-tabel-net/images/stories/artikel/makalah%20abdul%20manan.pdf>.di akses tanggal 7 Juli 2010

¹⁴ [http://syari'ah-online.org/ruu/tanggapan-terhadap-usulan-pemerintah-naskah-ruu-perbankan - syari'E2%80%90ah/default.asp](http://syari'ah-online.org/ruu/tanggapan-terhadap-usulan-pemerintah-naskah-ruu-perbankan-syari'E2%80%90ah/default.asp). di akses pada tanggal 7 Juli 2010

permusuhan akan dapat mengganggu kinerja pebisnis dalam menggerakkan roda perekonomian mereka.¹⁵

Untuk itu diperlukan suatu institusi baru yang lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa dan melahirkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution* menjaga kerahasiaan para pihak dan menyelesaikan masalah secara komprehensif di dalam kebersamaan dengan tetap menjaga hubungan baik.¹⁶

Ulama fiqhiyah mengartikan *al-qhada* dengan kalimat memutuskan atau menetapkan, lebih lanjut disebutkan bahwa *al-qhada* adalah menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat. 2. Dengan Proses Peradilan (*al-Qhada*)¹⁷

Islam sebagai agama yang diturunkan melalui wahyu merupakan agama yang komprehensif dan sebagai tuntunan hidup bagi setiap muslim. Dalam hal ini, ajaran agama Islam telah mengatur bagaimana langkah-langkah yang seharusnya di tempuh oleh setiap ummat Islam ketika menghadapi perselisihan atau sengketa dengan orang lain, untuk itu Islam mengenalkan tiga model kekuasaan penegak hukum dalam memutuskan perkara, yaitu :

Pertama, *Al-qadla* yaitu kekuasaan yang berwenang menyelesaikan masalah-masalah *al- ahwal asy-syakhsiyah* (masalah keperdataan termasuk masalah keluarga), masalah *jinayat* (pidana), dan tugas tambahan lainnya.

¹⁵ Wirdyaningsih, *Op Cit*, hlm. 274

¹⁶ *Ibid*, hlm. 275.

¹⁷ Gemala Dewi, dkk, *Op Cit*, hlm.

Kedua, *Al-hisbah* yaitu merupakan lembaga resmi negara yang berwenang untuk menyelesaikan masalah-masalah berupa pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan, seumpama sengketa pengurangan timbangan yang terjadi dalam sengketa jual beli.

Ketiga, *Al-mudzalim* yaitu badan yang dibentuk oleh pemerintah khusus untuk membela orang-orang yang teraniaya akibat sikap semena-mena penguasa negara, juga masalah suap dan korupsi.¹⁸

4). *Diddah* (murtad) Penyelesaian sengketa melalui peradilan berarti melewati beberapa proses, salah satunya adalah proses yang dianggap penting yaitu proses pembuktian, dalam hal ini alat bukti adalah:

- 1). *Ikrar* yaitu pengakuan tentang tindakan dari nasabah/mudharib
- 2). *Shahadat* (penyaksian)
- 3). *Yamin* (sumpah)

5). *Muktabah* yaitu bukti-bukti tertulis, seperti akte.

6). *Tabayyun* yaitu upaya perolehan kejelasan yang dilakukan oleh pemeriksaan mejelis peradilan.¹⁹

Sepintas sebenarnya penyelesaian melalui peradilan masih dianggap sebahagian orang dapat memberikan keputusan yang adil, namun bagi sebahagian lainnya menganggap peradilan

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Op Cit*, hlm. 143

¹⁹ Gemala Dewi,dkk, *Op Cit*, hlm. 89

belum mampu merangkul kepentingan bersama, bahkan Sedangkan alat bukti dalam Hukum Perdata, sesuai dengan Pasal 164 HIR, yaitu:

- a). Alat bukti tertulis yaitu akta autentik dan akta bawah tangan.
- b). Keterangan saksi
- c). Pengakuan
- d). Pengetahuan/persangkaan hakim.
- e). Sumpah

Secara umum alat bukti dalam hukum Islam dan hukum perdata hampir sama, cuma perbedaannya adalah terletak pada fungsi alat bukti *yamin* (sumpah), yang berlafazkan seperti, *Demi Allah* kalimat awalnya, sedangkan pada hukum positif adalah pengakuan saja. Sebenarnya konflik akan terjadi bila dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan yang kemudian berkembang menjadi sebuah sengketa baik pihak yang merasa dirugikan karena merasa tidak puas atas keprihatinannya baik secara langsung terhadap pihak yang dianggap atau penyebab kerugiannya tersebut, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaian, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menumbuh-kembangkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa. Akan tetapi pada prinsipnya penegakan hukum hanya dapat dilakukan salah satunya dengan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang dilembagakan secara konstitusional yang lazim disebut dengan badan yudikatif, dengan demikian wewenang memeriksa, mengadili sengketa hanya badan peradilan yang berwenang sesuai dengan kekuasaan kehakiman yang juga merupakan *derivate* dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.²⁰

²⁰ Wirnyaningsih, *Op Cit*, hlm. 208

Hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa yang berwenang dan berfungsi melaksanakan peradilan hanya badan peradilan, baik di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Mahkamah Konstitusi. Maka di luar itu dianggap bertentangan dengan hukum (*under the outhority of law*). Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak disebutkan ke peradilan mana sengketa syariah tersebut ditugaskan. Bahkan undang-undang ini justru menjadi salah satu landasan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan dengan tegas bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan peradilan Agama.

Walaupun masih tetap terjadi tarik menarik wewenang terhadap penyelesaian sengketa syariah ini, dengan bukti masih banyak bank syariah yang belum memilih penyelesaian sengketa melalui Peradilan Agama sebagai tempat penyelesaian sengketa yang di tuangkan dalam akad atau kontrak pembiayaan di maksud.

Dalam Ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat (1) disebutkan :²¹

Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama ; Selanjutnya pada Pasal 55 ayat (2) disebutkan: Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.²²

²¹ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat (1)

²² Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut :²³

- a. Musyawarah
- b. Mediasi perbankan
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain dan/atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum

Untuk itu ada beberapa alasan yang menyebabkan Peradilan Umum masih dianggap sebagai institusi penyelesaian sengketa syariah, yaitu sebagai berikut :

- (1). Bahwa realisasi dari kontrak bisnis di lembaga keuangan syariah sebahagiannya masih mengacu kepada ketentuan Bab III KUH Perdata, yang merupakan terjemahan dari *burgelijk wetboek* (BW) sehingga untuk memulai suatu transaksi secara syariah tidak terlepas dari pada KUH Perdata yang ada.²⁴
- (2). Wewenang Pengadilan Umum juga menangani di bidang bisnis, maka pada Pengadilan umum tersebut dapat disediakan kamar yang memeriksa kasus bisnis syariah seperti Pengadilan Niaga yang berada di bawah pengadilan Umum.
- (3). Menghindari gesekan-gesekan politis yang masih *apriori* terhadap Islam sehingga memperlambat lajunya pelaksanaan sistem ekonomi syariah. Namun pada pengadilan Umum ini juga terdapat kelemahan, jika penyelesaian sengketa syariah di berikan kepada badan ini, yaitu :

²³ Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No.21 Tahun 2008

²⁴ <http://agustianto.nirlah.com/2008/04/03/peradilan-agama-dan-sengketa-ekonomi-syariah>, di akses pada tanggal 7 Juli 2010

- (a). Para hakim di Peradilan Umum belum tentu menguasai permasalahan syariah, lagi pula dalam memeriksa dan mengadili sengketa di Peradilan Umum, hakim tidak merujuk kepada ketentuan hukum syariah.
- (b). Meskipun telah ada hukum materil yang mengatur perbankan Syariah para hakim di Pengadilan Umum, akan sulit untuk menerapkan hukum yang berlandaskan syariah Islam. Dari hal tersebut di atas sebagai rujukan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di dalam perbankan syariah, bagi Bank Muamalat Cabang Pekanbaru jika harus mendapat persoalan atau sengketa antara nasabah/ mudharib dengan pihak Bank tentang hal yang tercantum dalam akad, pihak Bank Muamalat Cabang Pekanbaru lebih mengedepankan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, karena dengan musyawarah lebih mencerminkan prinsip ke Islaman dan melahirkan hasil yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa. Jika tidak tercapai kata sepakat antara nasabah/mudharib dan Bank Muamalat Cabang Pekanbaru, maka persoalan tentang yang disengketakan mereka dapat menghunjuk Badan Arbitrase Syariah Nasional yang ada di daerah, dan jika juga tidak dapat terselesaikan hal ini baru diselesaikan melalui lembaga Peradilan Umum.²⁵

Dengan demikian pilihan penyelesaian sengketa dalam Akad Pembiayaan di Bank Muamalat Cabang Pekanbaru masih berpatokan kepada aturan yang lama belum mengacu kepada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menentukan kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah, dan tidak terbatas tentang penyelesaian sengketa di bank-bank syariah.

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Faisal di Bank Muamalat Cabang Pekanbaru, pada tanggal 11 Januari 2011

Di Bank Muamalat Cabang Pekanbaru belum ada sengketa pembiayaan mudharabah yang berlanjut hingga ditempuh penyelesaian melalui jalur pengadilan, maupun melalui jalur BASYARNAS, dimana bank Muamalat Cabang Pekanbaru mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dengan pihak nasabah/mudharib jika terjadi perselisihan.

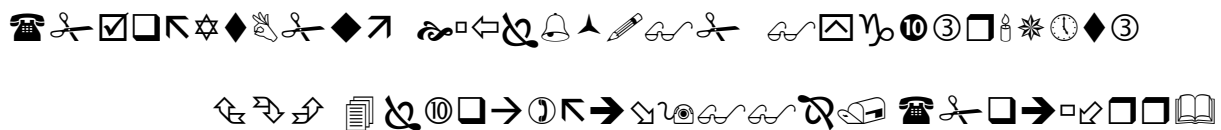
Penyelesaian perselisihan dengan jalan musyawarah ini merupakan prinsip penyelesaian dalam hukum Islam, lagi pula penyelesaian sengketa dengan jalan perdamaian atau musyawarah merupakan suatu penyelesaian yang sesuai dengan kultur masyarakat yang beradat dan bersendikan syara'. Namun untuk menangani perselisihan dengan menempuh jalan musyawarah, diperlukan sumberdaya manusia yang berilmu, profesional, jujur, adil dan bijaksana, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam syariah Islam dilaksanakan secara utuh (*kaffah*).

BAB IV

PENERAPAN SANKSI TERHADAP NASABAH/ MUDHARIB BILA MELANGGAR AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH

A. Landasan Penerapan Sanksi Terhadap Nasabah Bila Melanggar Akad Pembiayaan Mudharabah

Pada prinsipnya kerugian yang terjadi pada kegiatan usaha yang tidak dapat dihindari karena di luar kekuasaan manusia (*over macht*), sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*) dalam hal ini Bank, sedangkan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah/*mudharib* dalam mengelola usaha, penyelewengan/ penyalah-gunaan modal atau menunda-nunda pembayaran maka kerugian ditanggung oleh nasabah/ *mudharib*. Sehubungan dengan penerapan sanksi, telah ditentukan dalam QS.Maidah 1 :



“Hai orang beriman, penuhilah akad-akad itu.....”¹

Hadits Nabi yang riwayat Nasa’i, Abu Dawud, Ibnu Majah dan ahmad dari Syraid bin Suwaid mengatakan :

¹ Surah Al-Maidah ayat 1, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: Penerbit Assyifa’, 1998), hlm. 84

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu, menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya”.

Selanjutnya hadits Nabi riwayat jama’ah (Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa’i, Abu Dawud, Tirmizi, Malik, Darami dari Abu Hurairah, Ibnu Majah) mengatakan :

“menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”²

Dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran dapat diperoleh pengertian tentang yang dimaksud dengan sanksi adalah sanksi yang dikenakan lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran. Nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi yang didasarkan pada prinsip Ta’zir yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam pembayaran kewajibannya.

B. Penerapan Sanksi Terhadap Nasabah/ Mudharib Bila Melanggar Akad Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Cabang Pekanbaru.

Dalam perjanjian pembiayaan di Bank Muamalat Cabang Pekanbaru, terhadap nasabah/ mudharib yang melanggar akad pembiayaan mudharah, dapat dikenakan sanksi berupa denda

² Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran

sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat pada saat akad pembiayaan ditanda-tangani.

Penerapan sanksi baru diberlakukan oleh pihak Bank Muamalat Cabang Pekanbaru terhadap mudharib/ nasabah, apabila nasabah/ mudharib dianggap telah melanggar syarat-syarat akad, yaitu sebagai berikut :

- a). Mempergunakan pembiayaan yang diberikan Bank di luar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank (Side Streaming).
- b). Melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan atau akuisisi dengan pihak lain .
- c). Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan Bank .
- d). Melakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakan pailit oleh Pengadilan
- e). Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak Bank .
- f). Menolak atau menghalang-halangi Bank dalam melakukan pengawasan dan atau pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang mendapat fasilitas pembiayaan dari Bank berdasarkan isi akad, serta hal lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan termasuk dan tidak terbatas pada membuat photo copynya .

Pembiayaan bagi hasil mudharabah dalam perbankan syariah di kenal dengan istilah *Qiradh* adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola dan

keuntungan usaha di bagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad/kontrak.³

Dalam akad pembiayaan mudharabah disebutkan bahwa salah satu kewajiban nasabah adalah melakukan pembayaran pembiayaan yang disalurkan Bank Muamalat kepadanya, dimana bagi nasabah/mudharib yang mampu namun menunda-nunda pembayaran atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar. Hubungan keterikatan antara dua pihak sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, akan melahirkan konsekuensi yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yaitu seluruh kewajiban yang harus ditunaikan dan apa-apa yang menjadi hak masing-masing yang akan di terima. Dalam hal ini Al-Qur'an sebagai pedoman dari ajaran Islam yang ditafsirkan dengan realisasi muamalah fiqh menerangkan perjanjian merupakan pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan orang lain. Dengan demikian klausula yang dituangkan dalam akad pembiayaan mudharabah menjadi aturan yang mengatur seluruh kewajiban yang harus ditunaikan dan apa-apa yang menjadi hak masing-masing pihak, hutangnya boleh dikenakan sanksi yang didasarkan pada prinsip *Ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

Dalam Draft akad pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Cabang Pekanbaru maupun dalam beberapa akad pembiayaan yang telah di buat Bank Muamalat Cabang Pekanbaru dengan nasabah/ mudharib, adanya ketentuan yang mengatur tentang sanksi yang akan diberikan oleh Bank terhadap nasabah/ mudharib bila melanggar syarat-syarat akad, namun konsekwensi

³ Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 *tentang Pembiayaan Mudharabah* (Qiradh), hlm. 40

logis nasabah/mudharib melanggar isi akad pembiayaan mudharabah, Bank Muamalat cabang Pekanbaru , tidak dapat memberikan sanksi apapun terhadap nasabah/ mudharib, apabila dalam akad pembiayaan mudharabah yang di buat antara Bank Muamalat Cabang Pekanbaru dengan nasabah/ mudharib tidak ada mencantumkan klausula yang mengatur tentang sanksi terhadap nasabah/mudharib yang melanggar akad pembiayaan mudharabah. Khusus untuk KPRI Ikhtiarun Nafiah Bank Muamalat akan menyelesaikan permasalahannya ke Arbitrase dan Litigasi bila jalur musyawarah tidak juga menemui jalan terang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Al-Mudharabah*) pada Bank Muamalat Cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a. *Mudharabah* merupakan perjanjian atas suatu jenis perkongsian di mana pihak pertama (*Shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*Nasabah/ Mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Dimana landasan perjanjian pembiayaan mudharabah berdasarkan kitab suci Al-Qur'an, Al-Hadist, Dewan Fatwa Syari'ah Nasional MUI, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia.
- b. Dalam Pembiayaan mudharabah muthlaqah Bank Bank Muamalat Cabang Pekanbaru memberikan fasilitas dan otoritas serta hak sepenuhnya kepada mudharib atau nasabah/mudharib untuk melakukan usaha dan mengelola dana yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah ini sesuai dengan yang diinginkannya dan hal tersebut akan disebutkan dalam perjanjian atau akad/ kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Untuk pembiayaan mudharabah muthlaqah ini pihak Bank Muamalat Cabang Pekanbaru membaginya kepada dua kelompok mudharib, yaitu Mudharib perorangan dan Mudharib badan usaha dan umumnya Bank Muamalat Cabang Pekanbaru bekerjasama dengan koperasi untuk menyalurkan kepada anggota.

- c. Dalam pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah*, dimana Bank sebagai wakil *Shahibul Maal* menentukan pembatasan atau memberikan syarat kepada nasabah selaku *Mudharib* dalam mengelola dana seperti untuk melakukan *Mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu dan tempat tertentu saja. Dalam praktek di Bank Muamalat Cabang Pekanbaru belum ada nasabah/mudharib yang memohon pembiayaan mudharabah muqayyadah.
- d. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan penyaluran dana berdasarkan prinsip bagi hasil pada PT. Bank Muamalat Cabang Pekanbaru dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi yang berpedoman pada prinsip 5 C (*character, capacity, capital, collateral, conditon of economy*) ditambah delapan (8) aspek yaitu : aspek yuridis, manajemen, teknis, pemasaran, keuangan, sosial ekonomi, agunan serta aspek syariah.
- e. Pembiayaan *Mudharabah* dilakukan tanpa perlu adanya penyerahan jaminan oleh nasabah, namun dalam prakteknya untuk menghindari terjadinya penyimpangan oleh pengelola usaha/nasabah dan untuk mengurangi resiko, pihak Bank akan meminta jaminan dari nasabah bahwa ia sanggup mengembalikan pembiayaan *Mudharabah* tertentu sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

2. Penyelesaian atas pembiayaan mudharabah bermasalah dilakukan melalui :

a. **Langkah penyelamatan**, apabila pembiayaan masih ada harapan kembali

kepada Bank, yaitu *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Selain itu dapat pula dilakukan *merger*, *joint venture*, atau *take over* (pengambil-alihan) kegiatan usaha oleh Bank dengan akuisisi atau aliansi.

a. **Langkah penyelesaian, perselisihan antara nasabah/ Mudharib dengan Bank Muamalat Cabang Pekanbaru dalam pembiayaan mudharabah lebih mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah**, apabila pembiayaan sulit bahkan sudah tidak ada harapan kembali kepada Bank, upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan perdata ke lembaga Peradilan Agama atau melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sesuai dengan pilihan penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak, sebagaimana yang disebut dalam akad pembiayaan mudharabah.

3. **Penerapan sanksi yang akan diberlakukan oleh Bank kepada nasabah (Mudharib) yang mampu tapi menunda-nunda pembayaran** dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya dapat dikenakan sanksi yang didasarkan pada prinsip *Ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan di buat saat akad pembiayaan mudharabah ditanda-tangani oleh kedua belah pihak, namun oleh karena akad pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat

Cabang tidak mengatur dengan tegas tentang sanksi yang akan diberlakukan terhadap nasabah/ mudharib yang melanggar akad pembiayaan mudharabah, maka Bank Muamalat Cabang Pekanbaru tidak mungkin memberikan sanksi terhadap nasabah/ mudharib yang melanggar akad

B. Saran

1. Pihak-pihak yang terkait dalam masalah perbankan khususnya Bank berdasarkan Syariah lebih mensosialisasikan keberadaan Bank Syariah kepada masyarakat, terutama terhadap persepsi sebagian masyarakat yang pro dan kontra terhadap halal dan haramnya riba atau bunga Bank serta terhadap keunggulan konsep perbankan syariah yang berdasarkan prinsip kemitraan.
2. Peran pihak Bank Muamalat Cabang Pekanbaru dalam memberdayakan pengusaha kecil/golongan ekonomi lemah digiatkan terutama dalam penyediaan pembiayaan/modal serta persyaratan jaminan dipermudah, namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, guna menghindarkan risiko kerugian bagi pihak Bank.
3. Bank Muamalat Cabang Pekanbaru di sarankan untuk menyempurnakan akad pembiayaan mudharabah, dengan menambah klausula yang mengatur dengan tegas tentang sanksi yang akan diberlakukan terhadap nasabah/ mudharib yang melanggar akad pembiayaan mudharabah.

KEPUSTAKAAN

Abdullah Saed, Menyual Bank Syari'ah, Kritikan atas Interpretasi Bunga Bank NeoRevivaless
,(Jakarta: Paramadina, 2004)

Adiwarman A.Karim,Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan,(Jakarta:Raja
GrafindoPersada,2004)

Agustianto, Percikan Pemikiran Ekonomi Islam,(Bandung: Cipta Pustaka Media, 2002)

Alvi Syahrin, Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman
Berkelanjutan, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003)

Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek, (Jakarta:Gema InsaniPress,
2001)

Ascaya Diana Yunita, Bank Syari'ah: Gambaran Umum (Jakarta: PPSK BI, 2005)

Bismar Nasution, Mengkaji Ulang Sebagai landasan Pembangunan Ekonomi, Pidato pada
Pengukuhan Guru Besar, USU- Medan 17 April 2004

Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, makalah
disampaikan pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum Dan Hasil Penelitian
Hukum PadaMajalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Pebruari 2003.

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya,(Semarang: Kumudasmoro Grafindo,1994)

Gemala Dewi,dkk, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia,(Jakarta: Kencana, 2006)

Hasballah Thaib, Hukum Akad (kontrak) Dalam Fiqh Islam dan Praktek Di Bank
SistemSyari'ah, (Medan 2005)

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan
Mudharabah (Qiradh)

Muhamad, Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2000)

Muhamad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah,(Yogyakarta:
UII Press, 2001)

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2000)

Muhammad Safi'i Antonio, *Mukadimah Buku Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta:
diterbitkan kerjasama Bank Indonesia dengan Tazkia Institute, 1999)

Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek, (Jakarta:Gema Insani Press,
2001)

Muhammad, Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta:UII P r e s s , 2000)

Muslimin H. Kara, Bank Syariah di Indonesia Analisa Kebijakan Pemerintah Indonesia
terhadap Perbankan Syariah, (Yogyakarta: UII Press, Cetakan Pertama, 2005)

Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Gahlia Indonesia,1982)

Suharnoko, Perjanjian Teori dan Analisa Kasus (Jakarta: Kencana,2004)

Surah Al-Baqarah ayat 208, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Penerbit Assyifa',Semarang

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMI
TAKAFUL), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)

Wijarno, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,1995)

Yusuf Qordhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1997)

Makalah

Nasution, Bismar, Makalah *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Pebruari 2003.

-----, *Mengkaji Ulang Sebagai landasan Pembangunan Ekonomi*, Pidato Pada Pengukuhan Guru Besar,USU- Medan 17 April 2004.

-----, *Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal*, makalah yang disampaikan pada loka karya Pengelolaan Perusahaan (*corporate governance*), kerja sama program Pascasarjana Universitas Indonesia dan University of Souldth Carolina, di Jakarta tanggal 4 Mei tahun 2000.

-----, *Hukum dan Ekonomi*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema ‘*Signifikansi Hukum Islam Dalam Merespon Issu-issu Global*’, di Pascasarjana IAIN SU Medan, tanggal 19 juni 2004.

Pandjialam, Rissal Romeo, *Sistem Ekonomi Syariah: Kembali ke Khitoh Sebuah Refleksi Terhadap Perjuangan Setengah Hati*, makalah seminar nasional Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kerjasama Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara dengan Mahkamah Agung RI, Medan 27 Oktober 2007

Sitompul, Zulkarnain, *Kemungkinan penerapan Universal Banking Syariah Di Indonesia, Kajian Dari perspektip Bank Syariah*, Jurnal Hukum Bisnis.Vol.20,Agustus-September 2002.

Internet

<http://agustianto.nirlah.com/2008/04/03.peradilan-agama-dan-sengketa-ekonomi-syariah>, di akses pada tanggal 9 bulan Juli 2010.

<http://pa-pangkalpinang.pta-tabel-net/images/stories/artikel/makalah%20abdul%20manan.pdf>.di akses pada tanggal 9 Juli 2010.

[http://syariah-online.org/ruu/tanggapan-terhadap-usulan-pemerintah-naskah-ruu-perbankan -
syari%20%90ah/default.asp](http://syariah-online.org/ruu/tanggapan-terhadap-usulan-pemerintah-naskah-ruu-perbankan-syari%20%90ah/default.asp)